

07

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN *SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE*

Perusahaan menyadari bahwa dalam menjalankan aktivitas bisnis, perlu menjaga keseimbangan antara aspek *people*, *profit*, dan *planet*. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menjadi salah satu wujud menjaga keseimbangan tersebut dan merupakan bagian dari penerapan tata kelola keberlanjutan (*sustainability governance*) di Perusahaan. Hal ini ditunjukkan dalam upaya untuk menjaga keberlanjutan bisnis yang dapat menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan, serta mewujudkan kehidupan yang baik bagi semua pihak sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs) di waktu saat ini maupun di masa depan.

Praktik keberlanjutan ini diwujudkan melalui pelaksanaan program TJSL dalam berbagai aspek, seperti aspek sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan, produk dan/atau jasa, ekonomi, maupun lingkungan. Pelaksanaan program TJSL dilakukan secara sistematis dengan mencermati kebutuhan yang relevan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terjadi di internal maupun di eksternal Perusahaan untuk memastikan program TJSL yang efektif dan tepat sasaran.

DASAR PENERAPAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Program TJSL yang dilaksanakan oleh Perusahaan, dilandaskan pada peraturan perundangan-undangan dan rangkaian regulasi pendukung yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 dan Pasal 35;
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 2;
5. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

The Company realizes that in conducting business, it is necessary to maintain a balance between aspects of people, profit, and planet. Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR) is a way to maintain that balance and is part of implementing sustainability governance in the Company. This is aimed at maintaining business sustainability that can create value for all stakeholders, and constructing a good life for all parties in accordance with the Sustainable Development Goals (SDGs) at present and in the future.

The sustainability practice is achieved through the CSR program implementation in various aspects such as social aspects, employment, products and/or services, economics, and the environment. The CSR program is implemented systematically by paying attention to relevant demands in economic, social and environmental situations that occur in the Company's internal and external surroundings to ensure that the CSR program is effective and on target.

BASIS FOR IMPLEMENTING SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAMS

The CSR program implemented by the Company is based on a series of applicable laws, regulations and supporting regulations, including:

1. Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies Article 74;
2. Law No. 25/2007 concerning Capital Investment Article 15 and Article 35;
3. Law No. 32/2009 concerning Environmental Protection and Management;
4. Law No. 19/2003 concerning State-Owned Enterprises Article 2;
5. Law No. 6/2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2/2022 concerning Job Creation Becoming Law;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
8. Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan
10. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-1/MBU/02/2023 tahun 2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial dan Kemanusiaan pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.

Selain mengacu pada perundang-undangan dan rangkaian regulasi pendukung, pada proses implementasi perusahaan juga mengacu kepada prinsip maupun standar internasional yang relevan, seperti ISO 26000:2010, *The Ten United Nations Global Impact, Guidance on Social Responsibility*, dan berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

KOMITMEN SERTA KEBIJAKAN PENERAPAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Komitmen Perusahaan terhadap program TJSL tertuang dalam kebijakan yaitu, Keputusan Direksi No. KD.306/KU.207/ASDP-2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan perubahan-perubahannya, serta melalui prosedur program TJSL. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program TJSL dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berdampak pada pemangku kepentingan.

Perusahaan juga telah menunjuk tim khusus untuk mengelola program TJSL melalui Unit Kerja TJSL yang berada di bawah tanggung jawab Divisi *Corporate Secretary*. Tim pengelola

Apart from referring to law and supporting regulations, the Company's implementation process also refer to relevant international principles and standards, such as ISO 26000:2010, *The Ten United Nations Global Impact, Guidance on Social Responsibility*, and is oriented towards achieving the Sustainable Development Goals. (SDGs).

BASIS FOR IMPLEMENTING SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAMS

The Company's commitment to the CSR program is stated in Board of Directors' Decree No. KD.306/KU.207/ASDP-2023 concerning Social and Environmental Responsibility in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and its amendments as well as in procedures of CSR program. It ensures that the implementation of CSR program run in accordance with applicable regulations and brings impact on stakeholders.

The Company has also appointed a special team to manage the CSR program through the CSR Work Unit, which is under the responsibility of the Corporate Secretary

TJSL memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan keseluruhan program TJSL mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program TJSL.

Dalam melaksanakan program TJSL, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan;
2. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan;
3. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan;
4. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan;
5. Hukum dan tata kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Perusahaan memastikan program TJSL dapat memberikan dampak seluas-luasnya kepada pemangku kepentingan terutama bagi penerima manfaat TJSL itu sendiri. Untuk itu, penyusunan program TJSL dilakukan sesuai dengan kondisi aktual yang dilakukan melalui proses pemetaan sosial. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah sosial yang terjadi di sekitar wilayah operasional Perusahaan agar program dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, sehingga program yang dilaksanakan mampu mendorong masyarakat untuk lebih berdaya dan mandiri. Komitmen tersebut dituangkan oleh Perusahaan melalui berbagai program TJSL yang dirancang untuk dijalankan sepanjang tahun 2023. Program TJSL tersebut dibagi ke dalam empat pilar yang dimiliki oleh Perusahaan, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan program TJSL, Perusahaan memiliki unit kerja tersendiri yang dikhususkan untuk mengelola TJSL di Perusahaan.

Division. The CSR management team has responsibility for implementing complete CSR program starting from planning, implementation to evaluation.

In implementing the CSR program, the Company applies the following principles:

1. Integrated, based on risk analysis and business processes that are related to stakeholders;
2. Directed, having a clear direction to achieve company goals;
3. Measurable impact, provide contribution and benefits that produce change or added value for stakeholders and the company;
4. Accountability, being accountable to avoid potential abuse and irregularities;
5. Law and governance, to create legal certainty and effective, transparent, accountable and participatory governance to create secured stability and achieve a lawful state.

The Company ensures that the CSR program gives the widest possible impact on stakeholders, especially the CSR beneficiaries. For this reason, the preparation of the CSR program is carried out in accordance with actual conditions from a social mapping process. This process aims to identify ongoing social problems around the Company's operational areas so that programs are designed to fulfil the needs of the surrounding community, and the programs implemented motivates the community to be more empowered and independent. The Company's commitment is outlined in various CSR programs designed to be implemented throughout 2023. The CSR program is divided into four pillars, namely social, economic, environmental, as well as law and governance. To improve the optimization of CSR program management, the Company has assigned a specific work unit to manage CSR in the Company.

Informasi mengenai kinerja dan program TJSL telah disampaikan secara komprehensif dalam Laporan Keberlanjutan Tahun 2023. Laporan ini disajikan secara terpisah namun merupakan bagian integral dari Laporan Tahunan Perusahaan. Dengan penyajian secara terpisah dari Laporan Tahunan, Perusahaan berusaha memberikan pemahaman menyeluruh mengenai inisiatif, pencapaian, dan komitmen dalam aspek TJSL yang lebih komprehensif dan terfokus pada pembahasan mengenai laporan keberlanjutan. Pada Laporan Tahunan ini, Perusahaan akan memaparkan secara ringkas mengenai peran Perusahaan dalam melaksanakan program TJSL.

ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.488/PA.055/ASDP-2021 tentang Penetapan Uraian Jabatan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat dan Regional PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), penanggung jawab dan pengelola program TJSL di lingkup Perusahaan adalah *Corporate Secretary* melalui Manajer Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pengelola TJSL bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan program dan evaluasi program kerja TJSL setiap tahun. Di samping itu, unit kerja TJSL juga bertanggung jawab untuk menyusun kerangka kerja, visi, dan *roadmap* TJSL dalam jangka panjang serta menjadi penanggung jawab untuk mengintegrasikan seluruh aspek TJSL.

Di samping itu, dalam praktiknya pelaksanaan TJSL tidak hanya dilakukan oleh unit kerja TJSL, melainkan dilakukan oleh divisi lain yang memiliki relevansi dengan aspek-aspek TJSL. Divisi yang terlibat dalam pelaksanaan TJSL adalah sebagai berikut:

Information on CSR performance and programs was presented comprehensively in the 2023 Sustainability Report, which will appear separately but is an integral part of the Company's Annual Report. By presenting it separately from the Annual Report, the Company seeks to provide an extensive understanding of aspects of CSR initiatives, achievements and commitments that is more comprehensive, and focused on discussions about sustainability. In this Annual Report, the Company will briefly describe the Company's role in the CSR program implementation.

ORGANIZATION RESPONSIBLE FOR AND MANAGING SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAMS

Based on the Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.488/PA.055/ASDP-2021 concerning Defining of Organizational Position Descriptions and Work Procedures for the Head Office and Regional Offices of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), the official in charge to manage CSR program within the Company is *Corporate Secretary* through the *Corporate Social Responsibility Manager*. CSR Manager is responsible to execute budget and program planning, program management, and annual evaluation of CSR work programs. Aside from that, the CSR work unit is also responsible for formulating the long-term CSR framework, vision, roadmap and for integrating all aspects of CSR.

Moreover, in its practice, CSR implementation were carried out not only by the CSR work unit, but also by other divisions that have relevance to CSR. The divisions involved in implementing CSR are as follows:

No	Aspek Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan <i>Aspects of Corporate Social and Environmental Responsibility</i>	Penanggung Jawab <i>Unit Responsible</i>
1	Lingkungan Environment	Corporate Secretary Division
2	Hak Asasi Manusia Human Rights	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Perencanaan Organisasi & Sistem SDM Human Capital Planning Division Divisi Pengelolaan SDM HR Management Division
3	Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Employment, Health and Safety Practices	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Perencanaan Organisasi & Sistem SDM Human Capital Planning Division Divisi Pengelolaan SDM HR Management Division Divisi Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan (K2L) Safety, Health and Environment Division Sub Divisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Occupational Health and Safety Sub Division
4	Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Social and Community Development	Corporate Secretary Division
5	Pelanggan Customer	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Operasional Operations Division Divisi Pelayanan Pelanggan Customer Service Division
6	Praktik Operasi yang Adil Fair Operating Practices	Satuan Pengawas Internal Internal Audit Unit

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Dalam membangun tata kelola berkelanjutan, Perusahaan senantiasa membangun komunikasi dan keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Perusahaan dapat memahami harapan dan masukan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan terlibat dalam aktivitas bisnis, untuk selanjutnya dapat diselaraskan dengan strategi bisnis maupun program TJSL Perusahaan.

Keterlibatan dengan pemangku kepentingan juga memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dampak aktual dan potensial terhadap kegiatan bisnis Perusahaan, termasuk dampaknya terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Informasi ini kemudian digunakan untuk merancang tindakan pencegahan dan mitigasi terhadap potensi dampak negatif.

Perusahaan melakukan pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholders mapping*) guna mengidentifikasi kategori pemangku kepentingan yang terdampak atau memberikan dampak pada operasional Perusahaan, dengan mempertimbangkan

STAKEHOLDERS INVOLVEMENT

In building sustainability governance, the Company always builds communication and involvement from all stakeholders. This aims to ensure that the Company understands the expectations and suggestions from parties with interests and are involved in business activities, so as to ensure alignment with the Company's business strategy and CSR program.

Engagement with stakeholders to identify actual and potential impacts on the Company's business activities, including impacts on economic, environmental and social aspects. This information is then used to design prevention and mitigation measures against potential negative impacts.

The Company drafted stakeholder mapping to identify categories of stakeholders who are affected or cause impact on the Company's operations, taking into account economic, environmental, and social dimensions. The mapping was created with

dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pemetaan ini dilakukan dengan tujuan memahami relasi antara Perusahaan dan pemangku kepentingan, mengetahui potensi serta masalah yang ada, sehingga program yang akan dijalankan dapat tepat sasaran sesuai dengan ekspektasi para pemangku kepentingan, dan menyusun rencana program yang efektif. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, Perusahaan telah mengkategorikan pemangku kepentingan ke dalam enam kelompok, yaitu pemegang saham, pemerintah, karyawan, pengguna jasa atau pelanggan, pemasok dan masyarakat umum. Setiap pemangku kepentingan memiliki isu utama dan metode pendekatan yang berbeda antar satu sama lain, yang secara rinci disajikan pada tabel berikut ini:

the objective to understand the relationship between the Company and its stakeholders, understanding the potential and existing problems, such that the program implemented can fulfil the expectations of stakeholders, and develop an effective program plan. Based on the identification results, the Company has categorized stakeholders into six groups, namely shareholders, government, employees, service users or customers, suppliers, and the general public. Each stakeholder has core issues and approaches that are uniquely different, as presented in detail in the following table:

Pemetaan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan Perusahaan *Mapping and Involvement of Company Stakeholders*

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Isu Utama Main Issue	Metode Pelibatan Involvement Method
Pemegang Saham Shareholders	Memaksimalkan nilai Perusahaan bagi Pemegang Saham, serta mengoptimalkan pencapaian <i>key performance indicators</i> . Maximize Company's value for Shareholders, as well as optimize the key performance indicators achievement.	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). General Meeting of Shareholders (GMS). Rapat Dewan Komisaris dengan Komite. Joint Meeting of the Board of Commissioners with Committees.
Pemerintah Government	Menjamin kelancaran dan keamanan pelabuhan dan penyeberangan untuk mengoptimalkan proses bisnis yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ensure the smooth operations and security of ports and ferries to optimize business processes that drive national economic growth.	<ul style="list-style-type: none"> Pelaporan terkait hasil kinerja, keamanan pelabuhan dan penyeberangan, serta ketenagakerjaan. Reports related to performance results, port and ferry security, and employment. Kerja sama terkait Penerimaan Modal Negara. Cooperation related to State Capital Participation. Rapat Dengar Pendapat dengan DPR. Hearing Meeting with the Parliamentary.
Karyawan Employee	Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman bagi karyawan, serta memastikan kesejahteraan karyawan. Create a positive and safe work environment for employees, and ensure employee welfare.	<ul style="list-style-type: none"> Perayaan Hari Ulang Tahun Perusahaan. Company Anniversary Celebration. Acara internal Perusahaan. Internal Company events. Pertemuan dengan Serikat Pekerja. Meeting with Union. Simulasi Tanggap Darurat Bencana. Simulation of Disaster Emergency Response. Pendidikan dan pelatihan untuk seluruh karyawan. Knowledge and training for all employees. Survei kepuasan karyawan. Employee satisfaction survey.

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Isu Utama Main Issue	Metode Pelibatan Involvement Method
Pengguna Jasa atau Pelanggan Service Users or Customers	Menyediakan jasa penyeberangan yang berkualitas dan memenuhi kepuasan pengguna jasa atau pelanggan. Provide quality ferry transportation services and meeting the satisfaction of service users or customers.	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan layanan pelanggan Provide customer service. Survei kepuasan pelanggan. Customer satisfaction survey. Aplikasi Ferizy. Ferizy application.
Pemasok Supplier	Menyediakan, membangun, dan mengelola pelabuhan dan penyeberangan yang berkualitas dan memenuhi kepuasan pemasok. Provide, build and manage quality ports and ferry services, and fulfill supplier satisfaction.	<ul style="list-style-type: none"> Survei vendor Vendor survey. Business review meeting. Business review meeting.
Masyarakat Umum General Public	Menjamin kelancaran dan keamanan pelabuhan dan penyeberangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ensure the smooth and safe operations of ports and ferriage to encourage national economic growth which will improve community welfare.	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan TJSL. CSR activities. Forum dengan masyarakat sekitar untuk mendapat aspirasi terkait kebutuhan masyarakat Forums with local communities to gain community aspirations.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERKAIT ASPEK KEBERLANJUTAN

Perusahaan secara berkelanjutan melakukan pengembangan kompetensi terkait dengan aspek keberlanjutan sebagai upaya untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas SDM dalam penerapan tata kelola keberlanjutan. Pada tahun 2023, pengembangan kompetensi ini diutamakan untuk Dewan Komisaris dan Direksi serta penanggung jawab program TJSL. Satu program pengembangan kompetensi terkait aspek keberlanjutan yaitu ESG for Boards yang diselenggarakan oleh BUMN Leadership & Management Institute secara online pada 27 September 2023.

COMPETENCY DEVELOPMENT RELATED TO SUSTAINABILITY ASPECTS

The Company continuously develops competencies on sustainability aspects in efforts to strengthen and improve the human resource capability in implementing sustainability governance. In 2023, the competency development was prioritized for the Boards of Commissioners and Directors as well as executives responsible for the CSR program. One competency development program related to sustainability was ESG for Boards, which was organized by the SOEs Leadership & Management Institute virtually on 27 September 2023.

PENILAIAN RISIKO ATAS ASPEK KEBERLANJUTAN

Dalam pengelolaan aspek keberlanjutan, Perusahaan senantiasa melakukan proses manajemen risiko melalui kerangka kerja ISO 31000 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Melalui kerangka kerja ini, Perusahaan dapat menghasilkan sistem manajemen risiko yang terintegrasi di seluruh Perusahaan dengan perspektif yang menyeluruh.

Komitmen Perusahaan terkait manajemen risiko atas aspek keberlanjutan dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.772/HK.002/ASDP-2023 tentang Pedoman Manajemen Risiko PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.193/HK.002/ASDP-2023, tentang Pedoman Sistem Manajemen Keberlangsungan Usaha PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Dalam praktiknya, manajemen risiko atas aspek keberlanjutan dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko berkoordinasi dengan Divisi *Corporate Secretary* dan Unit Kerja TJSL yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program TJSL. Divisi Manajemen Risiko juga berkoordinasi dengan divisi lain yang memiliki keterkaitan dengan aspek keberlanjutan seperti, Divisi Operasional, Divisi Pelayanan Pelanggan, Divisi K2L, Divisi Pengelolaan SDM dan Divisi Pengembangan Organisasi dan Sistem SDM serta, Divisi Hukum. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan manajemen risiko pada aspek lingkungan terutama pencemaran dan pengendalian emisi, ekonomi, dan pengembangan masyarakat, ketenagakerjaan dan keselamatan tenaga kerja, hukum serta tata kelola keberlanjutan. Direksi memiliki peran dalam mengelola, melakukan pengawasan, peninjauan, dan evaluasi atas penerapan manajemen risiko pada aspek keberlanjutan secara berkala terutama apabila terdapat isu-isu strategis yang perlu diputuskan oleh Direksi.

RISK ASSESSMENT OF SUSTAINABILITY ASPECTS

In managing sustainability, the Company consistently adhere to risk management processes of the ISO 31000 framework and Regulation of Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. Through this framework, the Company produced an integrated risk management system on the entire Company with a comprehensive perspective.

The Company's commitment in risk management about sustainability is stated in the Joint Decree of the Boards of Commissioners and Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.772/HK.002/ASDP-2023 concerning Risk Management Guidelines for PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.193/HK.002/ASDP-2023, concerning Guidelines for the Business Continuity Management System of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

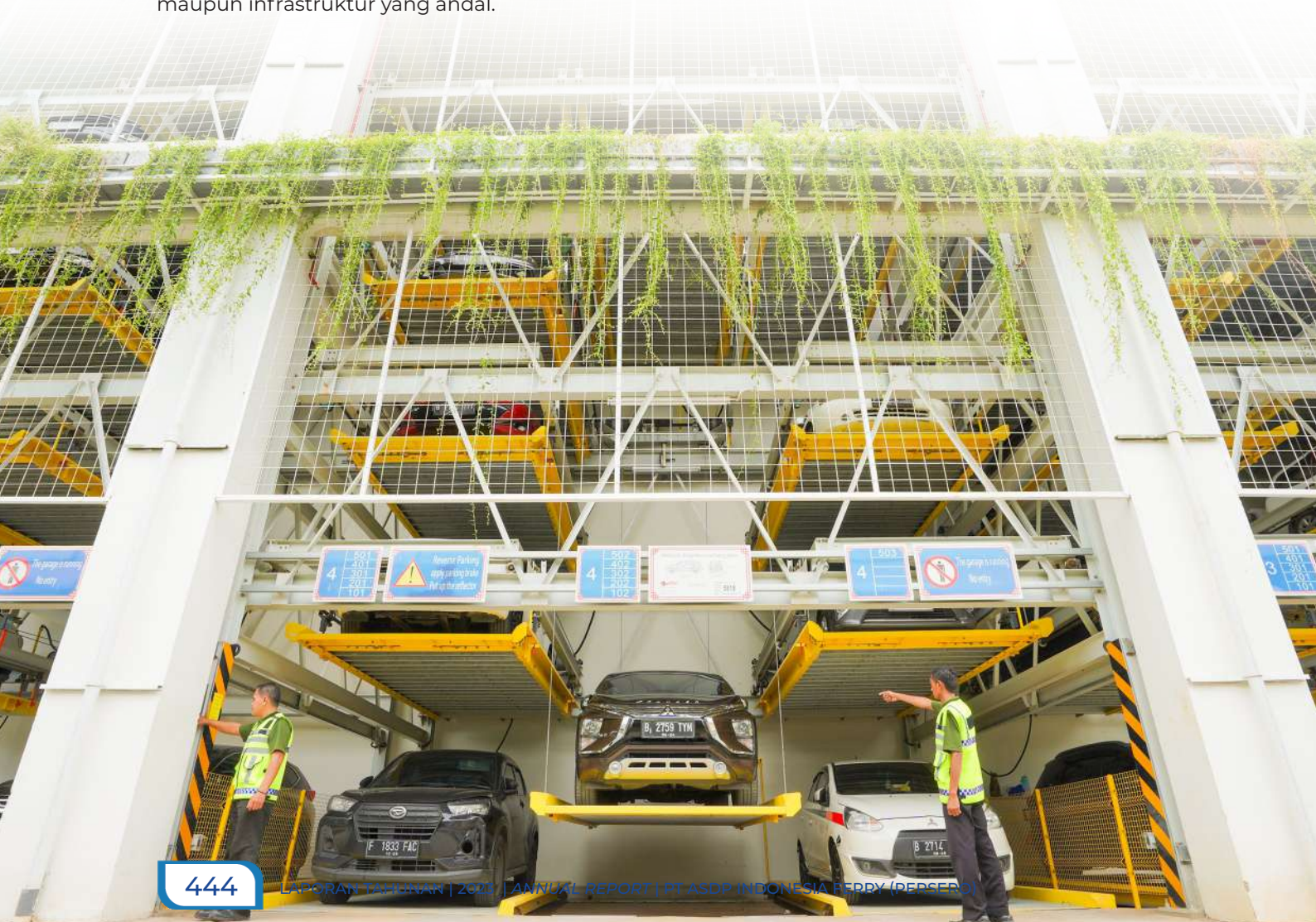
Realistically, risk management on sustainability aspects is carried out by the Risk Management Division in coordination with the Corporate Secretary Division and the CSR Work Unit, beginning with the planning process, implementation to evaluation of the CSR program. The Risk Management Division also coordinates with other divisions on aspects of sustainability, such as the Operations Division, Customer Service Division, HSE Division, HR Management Division, Human Capital Planning Division, and Legal Division. This ensured risk management in environmental aspects, especially pollution and emission control, economic and community development, employment and worker safety, law, and sustainability governance. The Board of Directors held roles in managing, supervising, reviewing and evaluating the risk management implementation in sustainability on a regular basis, most importantly at times when the Board of Directors is required to make decision on strategic issues.

TANTANGAN TERKAIT ASPEK KEBERLANJUTAN

Perusahaan menyadari bahwa dalam implementasi tata kelola keberlanjutan dan program TJSL, selalu dihadapkan pada sejumlah tantangan keberlanjutan. Tantangan tersebut dapat berupa perubahan dan krisis lingkungan semakin cepat, serta persaingan usaha yang ketat. Di samping itu, perubahan regulasi terkait aspek keberlanjutan yang berubah kian cepat juga menjadi tantangan tersendiri bagi Perusahaan untuk mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi tersebut. Dalam menghadapi tantangan keberlanjutan tersebut, Perusahaan melakukan berbagai langkah, di antaranya melakukan transformasi digital, melakukan inovasi yang berorientasi pada *green energy* dan *green building*, melakukan pengembangan kompetensi yang berorientasi pada keberlanjutan, serta mendorong menjaga kesiapan armada maupun infrastruktur yang andal.

CHALLENGES RELATED TO SUSTAINABILITY ASPECTS

The Company realizes that implementation of sustainability governance and CSR program will always face a number of challenges. These challenges include increasingly rapid environmental changes and the crises they bring, as well as fierce business competition. Apart from that, changes in regulations related to sustainability aspects are changing rapidly, thus presenting challenges for the Company to adapt to the regulatory changes. In facing these sustainability challenges, the Company is taking various steps, such as digital transformation, create innovations oriented towards green energy and green building, develop competencies oriented towards sustainability, and maintain the fleet readiness and reliable infrastructure.



STRATEGI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

STRATEGY IN SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Program TJSL menjadi salah satu komitmen Perusahaan dalam mengambil peran untuk mencapai SDGs dalam aspek ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum, dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah dan terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan telah menyusun strategi TJSL termasuk kerangka kerja dan program TJSL yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis, potensi dampak bisnis yang ditimbulkan, serta kebutuhan masyarakat sekitar area kerja Perusahaan.

KERANGKA KERJA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Dalam menyusun program kerja TJSL yang komprehensif, Perusahaan mengadopsi kerangka kerja ISO 26000 yang menjadi standar global dalam pelaksanaan TJSL. Kerangka kerja ISO 26000 memberikan garis besar tentang prinsip dan area inti yang harus dikelola oleh Perusahaan, untuk memastikan Perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengontrol risiko tanggung jawab sosial tertentu dan dampaknya. Sehingga dalam praktiknya, Perusahaan dapat memastikan area-area TJSL yang harus dikelola dan memiliki relevansi dengan kegiatan Perusahaan sehingga Perusahaan dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan.

One of the Company's commitments in the CSR program is taking an active role in achieving the SDGs related to economic, social, environmental as well as legal and governance aspects through better integration, targeted, measurable and accountability. The Company has developed CSR strategies that include tailored CSR framework and programs to business characteristics, potential business impacts, and the community needs around the Company's working area.

PROGRAM FRAMEWORK OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

In preparing a comprehensive CSR work program, the Company adopts the ISO 26000 framework, a global standard for CSR implementation. The ISO 26000 framework outlines principles and core areas that the Company must manage to ensure identification and risks control of specific social responsibility and their impacts. Thus, the Company is able to ascertain on CSR areas relevant to the Company's activities that need to be managed so that the Company can achieve sustainable development goals.

Kerangka Kerja ISO 26000 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan *ISO 26000 Framework for Social and Environmental Responsibility*



Sesuai dengan kerangka kerja tersebut, terdapat 7 subjek tanggung jawab sosial yang menjadi area pengelolaan TJSL Perusahaan yang meliputi tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, operasi yang adil, isu pelanggan, serta pelibatan dan pengembangan komunitas masyarakat. subjek TJSL tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi perusahaan dalam menyusun pilar TJSL yang menjadi acuan dalam penyusunan program kerja TJSL.

As shown in the framework, there are 7 subjects of social responsibility that becomes the scope of Company's CSR management. The subjects include organization governance, human rights, labour practices, the environment, fair operating practices, consumer issues, and community involvement and development. The CSR subjects serve as the basis for the company to prepare the CSR pillars, which will become points of reference in formulating the CSR work program.

PILAR PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Penyusunan pilar TJSL mengacu pada 7 subjek dalam ISO 26000 tentang TJSL dan Peraturan Menteri BUMN No. PER 1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN. Berdasarkan acuan tersebut, Perusahaan memformulasikan 4 (empat) pilar TJSL yang mencakup keseluruhan aspek dan subjek yang tercantum dalam ISO 26000 maupun Peraturan Menteri BUMN. Keempat pilar TJSL Perusahaan meliputi:

PILLARS OF THE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM

The formulation of the CSR pillars refers to the 7 subjects in ISO 26000 concerning CSR and Regulation of Minister of SOEs No. PER 1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for SOEs. Based on these references, the Company formulated 4 (four) pillars of CSR which cover all aspects and subjects listed in ISO 26000 and in Ministerial Regulation. The four pillars of the Company's CSR are:

Sosial <i>Social</i>	Untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. The fulfillment of quality basic human rights in fair and equal manner to improve welfare for all Indonesian people.
Lingkungan <i>Environment</i>	Untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. For sustainable natural resources and environmental management to support all lives.
Ekonomi <i>Economy</i>	Untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. To achieve quality economic growth through sustainable employment and business opportunities, innovation, inclusive industry, adequate infrastructure, affordable clean energy and supported by partnerships.
Hukum dan Tata Kelola <i>Law and Governance</i>	Untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara yang berdasarkan hukum. To create legal certainty and effective, transparent, accountable and participatory governance in order to create secured stability and achieve a lawful state.

Berdasarkan keempat pilar TJSL, Perusahaan kemudian menyusun program kerja yang relevan dengan setiap pilar TJSL. Proses penyusunan program tidak hanya melibatkan pihak internal, namun juga melibatkan pihak eksternal melalui *social mapping* untuk memastikan relevansi program dengan isu yang terjadi di masing-masing pemangku kepentingan dan di wilayah kerja yang memiliki karakteristik sosial maupun geografis yang beragam. Hasil dari *social mapping* kemudian disusun menjadi program kerja TJSL termasuk penyusunan anggarannya yang selanjutnya ditetapkan dalam RKAP.

RELEVANSI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DENGAN SDGS

Pemerintah mendorong seluruh BUMN untuk berkontribusi dalam pencapaian SDGs. Dalam merespon hal tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk mendukung upaya tersebut sejalan dengan peran BUMN sebagai *agent of development* yang diharapkan dapat mendorong pembangunan di seluruh aspek keberlanjutan. Dalam menjalankan program TJSL, Perusahaan memetakan pilar TJSL dan relevansinya dengan SDGs sehingga dapat dipastikan bahwa program TJSL yang dilaksanakan sejalan dengan sasaran SDGs.

Based on the four CSR pillars, the Company prepared work programs that were relevant to respective CSR pillar. The program preparation process involved internal and external parties by tapping into social mapping to ensure program relevance to issues occurring to each stakeholder and in work areas with diverse social and geographical characteristics. The results from social mapping are compiled into a CSR work program, including drafted budget which is inputted in the WPB.

RELEVANCY OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAMS TO THE SDGS

The government encourages all SOEs to contribute to achieving the SDGs. Responding to this, the Company, assumed its role of SOEs as an agent of development, remained committed to support efforts to encourage development in all aspects of sustainability. In implementing the CSR program, the Company mapped the CSR pillars and their relevancy to the SDGs to assured that the CSR program implemented was in line with the SDGs targets.

Relevansi Pilar TJSL dengan SGDs *Relevancy of the CSR Pillars to the SDGs*



PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2023

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 mengenai Penugasan Khusus dan Program TJSL BUMN, serta sesuai dengan peraturan internal yang ditetapkan, Perusahaan telah mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program TJSL tahun 2023. Anggaran ini disepakati dan ditetapkan dalam RKAP Tahun 2023, mencerminkan komitmen perusahaan untuk melaksanakan inisiatif sosial dan lingkungan sebagai bagian integral dari operasional dan tanggung jawab korporatnya. Berikut rincian anggaran program TJSL tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh Perusahaan dan dibagi ke dalam empat pilar:

2023 PROGRAM FOR SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Based on the provisions in the Regulation of Minister of SOEs No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and the CSR Program in the SOEs, as well as in accordance with established internal regulations, the Company had allocated funds for implementing the CSR program in 2023. The budget was agreed and stipulated in the 2023 WPB, reflecting the company's commitment to implement social and environmental initiatives as an integral part of its operations and corporate responsibilities. The following shows details of the 2023 CSR program budget that was set by the Company and was divided into four pillars:

No	Pilar Pillars	Target RKAP 2023 (Rp) 2023 WPB Target (Rp)
1	Sosial Social	3.635.000.000
2	Ekonomi Economy	1.825.000.000
3	Lingkungan Environment	3.275.000.000
4	Hukum dan Tata Kelola Law and Governance	25.000.000
TOTAL		8.760.000.000

PENCAPAIAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah merealisasikan anggaran program TJSL sebesar Rp8,58 miliar pada empat pilar program TJSL yang dilakukan di seluruh wilayah kerja Perusahaan. Realisasi tersebut mencapai 97,96% dari target RKAP 2023 dan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran TJSL tahun 2022 yang mencapai Rp6,56 miliar. Peningkatan ini didorong oleh perencanaan program TJSL yang lebih terarah serta penguatan komitmen Perusahaan terhadap pelaksanaan program TJSL.

ACHIEVEMENT OF THE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN 2023

Throughout 2023, the Company had disbursed CSR budget of Rp8.58 billion onto four pillars of the CSR program carried out throughout all of the Company's work areas. The realized program was 97.96% of the 2023 WPB target and was higher than the 2022 realized CSR funds at Rp6.56 billion. This increase was the result of better targeted program planning and stronger Company commitment to implementing the CSR program.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran TJSL 2023 (Rupiah)
Comparison Table of 2023 CSR Budget Target and Realization (Rupiah)

No	Pilar Pillars	Target RKAP 2023 2023 WPB Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)
1	Sosial Social	3.635.000.000	2.237.488.400	61,55%
2	Ekonomi Economy	1.825.000.000	1.983.372.317	108,68%
3	Lingkungan Environment	3.275.000.000	4.360.267.886	133,14%
4	Hukum dan Tata Kelola Law and Governance	25.000.000	-	0,00%
TOTAL		8.760.000.000	8.581.128.603	97,96%

Pada tahun 2023, Perusahaan memfokuskan pelaksanaan program TJSL pada pilar lingkungan dengan catatan realisasi anggaran pilar lingkungan menjadi yang terbesar yaitu sebesar Rp4,36 miliar dengan capaian terhadap RKAP mencapai 133,14%. Hal ini sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam merespon isu lingkungan yang kian meningkat, sehingga Perusahaan berupaya berperan secara optimal dalam menjaga kelestarian lingkungan.

In 2023, the Company focused on the implementation of the environmental pillar of CSR program, as it recorded largest budget realization at Rp4.36 billion, or 133.14% of the target set in WPB. This was in line with the Company's commitment to greater responsiveness on environmental issues, leading the Company to put more effort to optimally preserving the environment.

MEMBANGUN BUDAYA KEBERLANJUTAN

Salah satu upaya dalam mendorong implementasi aspek keberlanjutan di Perusahaan yaitu, dengan membangun budaya keberlanjutan bagi seluruh karyawan di Perusahaan. Upaya ini dilakukan melalui program budaya maupun penerapan kebijakan yang terdiri dari *risk culture & awareness*, *anti-fraud campaign*, *safety culture & awareness*, sosialisasi sistem manajemen anti penyuapan, dan budaya hemat energi untuk menunjang aspek lingkungan.

Penanggung jawab budaya keberlanjutan berada pada masing-masing divisi yang terkait dengan aspek-aspek keberlanjutan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan *Corporate Secretary* yang membawahi Unit Kerja Komunikasi Perusahaan untuk menunjang proses sosialisasi dan internalisasi budaya yang terarah.

BUILDING A CULTURE OF SUSTAINABILITY

One of the efforts to motivate the implementation of sustainability aspects in the Company is by building a culture of sustainability among all Company's employees. The effort is carried out through cultural programs and policies implementation consisting of *risk culture & awareness*, *anti-fraud campaign*, *safety culture & awareness*, socialization of anti-bribery management systems, and energy saving culture to support environmental aspects.

The executives responsible for sustainability culture are appointed from each division that closely related to aspects of sustainability. Their duties implementation are coordinated with the *Corporate Secretary*, who oversees the *Corporate Communications Work Unit*, to support the manner of guided socialization and culture internalization.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK HAK ASASI MANUSIA

SOCIAL RESPONSIBILITY ASPECTS OF HUMAN RIGHTS

Mengacu pada pedoman ISO 26000 tentang Tanggung Jawab Sosial, HAM mencakup beberapa aspek kritis, termasuk non-diskriminasi dan perhatian terhadap kelompok rentan; menghindari kerumitan; hak-hak sipil dan politik; hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya; serta hak-hak dasar pekerja. Perusahaan telah secara penuh melaksanakan cakupan definitif ini, baik dalam kegiatan operasional yang melibatkan karyawan, pelanggan, dan mitra, maupun dalam keterlibatan dengan masyarakat di wilayah sekitar pelabuhan.

Dalam konteks ini, Perusahaan menjadikan HAM sebagai dasar yang mendasari hubungan dengan setiap individu yang terlibat atau terkena dampak langsung atau tidak langsung dari kegiatan operasional dan usaha yang dilakukan. Ini mencakup kebijakan dan praktik yang mempromosikan non-diskriminasi, perlindungan kelompok rentan, penghindaran kerumitan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar pekerja. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek aktivitas perusahaan, baik itu melibatkan internal (karyawan) maupun eksternal (pelanggan, mitra, dan masyarakat). Pendekatan ini tidak hanya sejalan dengan standar ISO 26000, tetapi juga mencerminkan komitmen Perusahaan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dalam seluruh dimensi operasionalnya.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memiliki komitmen yang tinggi dan kuat untuk mewujudkan dan melindungi HAM dari setiap individu yang terlibat. Komitmen tersebut dituangkan melalui berbagai kebijakan terutama terkait dengan pengelolaan SDM dan hubungan industrial yang menegaskan komitmen Perusahaan terkait HAM. Selain itu, Perusahaan juga memastikan bahwa setiap individu menerima kesempatan

Referring to the ISO 26000 guidelines on Social Responsibility, human rights cover several critical aspects, including non-discrimination and better attention to vulnerable groups; avoidance of complications; civil and political rights; economic, social and cultural rights; as well as workers' basic rights. The Company has fully implemented the defined scopes, both in operational activities involving employees, customers and partners, as well as in community engagement in the area around the port.

In this context, the Company places human rights as the basis for every direct or indirect relationship with individuals affected by operational and business activities. This includes policies and practices that promote non-discrimination, protection of vulnerable groups, avoidance of complexity, and respect for workers' basic rights. It is reflected in various aspects of the company's activities involving internal party (employees) and external parties (customers, partners and the community). The approach aligns with the ISO 26000 standard, and reflects the Company's commitment to uphold human rights in all operational dimensions.

COMMITMENTS AND POLICIES

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) commits strongly to fulfil and protect human rights for every individual. This commitment is expressed through various policies, especially policies on HR management and industrial relations, which emphasize the Company's commitment to human rights. Moreover, the Company ensures that every individual receives equal opportunities to training, education and competency. The Company

yang sama dalam pelatihan, pendidikan, dan kompetensi. Perusahaan pun bertekad untuk memperkuat hubungan industri dan menghargai HAM serta kewajibannya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait tanggung jawab terhadap HAM yang berpedoman pada peraturan dan kebijakan terkait HAM, baik nasional maupun internasional yang berlaku. Kebijakan tersebut secara garis besar memuat isu HAM di Perusahaan di seluruh lini bisnis perusahaan dan pemangku kepentingan, yaitu kesetaraan dan kesempatan kerja, pekerja di bawah umur, pekerja paksa, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan waktu kerja.

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK HAK ASASI MANUSIA

Kesetaraan dan Kesempatan Kerja

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan kesetaraan peluang kerja bagi setiap individu untuk berkarier, mengembangkan diri, dan memberikan kontribusi dalam membangun organisasi tanpa membedakan jenis kelamin, usia, suku, agama, ras, golongan, dan faktor keberagaman lainnya. Seluruh proses manajemen sumber daya manusia dimulai dari rekrutmen hingga pemenuhan remunerasi/kesejahteraan dan hak-hak karyawan lainnya, harus memprioritaskan prinsip kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi semua karyawan. Pengangkatan calon karyawan didasari oleh hasil seleksi, hasil evaluasi selama masa percobaan dan orientasi karyawan secara objektif dan transparan.

Hingga 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki 4.738 karyawan yang tersebar di seluruh wilayah operasional Perusahaan. Karyawan di Perusahaan terbagi ke dalam karyawan darat dan karyawan laut yang komposisinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

is determined to strengthen industrial relations and respect human rights along with its obligations according to applicable regulations and policies.

The Company has set down policies for commitment on human rights as guided by applicable national and international regulations and policies of the same subject. In general, the policy contains human rights issues across all Company's business lines and stakeholders, which are equality and employment opportunities, child workers, forced labor, freedom of association and assembly, and working time.

IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN ASPECTS OF HUMAN RIGHTS

Equality and Employment Opportunities

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ensures equal employment opportunities for all individuals to build careers, develop themselves, and contribute to building the organization without discriminating gender, age, ethnicity, religion, race, class and other diversity factors. The process of human resource management, from recruitment to providing remuneration and other employee rights, must prioritize the principles of equality and equal opportunities for all employees. Prospective employees are appointed based on selection results, evaluation results during the trial period and employee orientation in an objective and transparent manner.

As of 31 December 2023, the Company employed 4,738 people spread throughout the Company's operational areas. Employees are categorized into ashore employees and marine employees, which composition can be seen in the following table:

Jenis Karyawan Employee Type	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Total
Darat Ashore	1.326	345	1.671
Laut Marine	3.063	4	3.067
Total	4.389	349	4.738

Perusahaan memastikan bahwa proporsi karyawan laki-laki yang lebih banyak disebabkan oleh dominasi jumlah pelamar laki-laki yang melamar di Perusahaan. Dalam upaya menciptakan kesetaraan dan menghormati prinsip-prinsip inklusivitas, Perusahaan dengan seksama mengelola proses penerimaan tenaga kerja untuk memberikan peluang yang setara bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Selain itu, Perusahaan pun menekankan kebijakan remunerasi dan manfaat yang sama untuk semua karyawan, tanpa adanya perbedaan antara karyawan laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan aman bagi seluruh karyawan yang mendorong pertumbuhan karier tanpa memandang gender, serta memberikan penghargaan yang setara atas kontribusi yang diberikan oleh setiap karyawan, baik laki-laki maupun perempuan.

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan juga tidak mendapatkan laporan maupun temuan terkait tindakan diskriminasi terhadap suku, ras, jenis kelamin, agama, opini politik, latar belakang sosial, atau bentuk diskriminasi lainnya yang melibatkan pihak-pihak terkait, baik internal maupun eksternal, di seluruh operasional Perusahaan. Perusahaan juga memberikan dukungan terhadap partisipasi pekerja perempuan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.229/PA-207/ASDP-2023 tentang Cuti dan Izin Meninggalkan Pekerjaan Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), yang mengatur mengenai cuti haid, cuti melahirkan, dan cuti keguguran kandungan.

Pemenuhan Ketentuan Terkait Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa

Sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, Perusahaan tunduk pada larangan mempekerjakan anak-anak dan melibatkan tenaga kerja paksa. Sejalan dengan prinsip-prinsip ini, Perusahaan mengambil komitmen tegas untuk tidak melibatkan individu di bawah usia yang diizinkan dan menghindari segala bentuk tenaga kerja paksa. Komitmen ini mencerminkan komitmen kuat Perusahaan untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia

The Company verified that the greater proportion of male employees resulted from predominantly male applicants applying to the Company. In efforts to create equality and respect the principles of inclusivity, the Company is conscientiously overlooking and managing the recruitment process to provide equal opportunities for all individuals, regardless of gender. Moreover, the Company also emphasized the equal remuneration and benefits policy for all employees, without discriminating male and female employees. This approach reflected the Company's commitment to create a fair and safe work environment to boost employees career growth regardless of gender as well as being equally appreciative for the contributions made by employees, men or women.

Throughout 2023, the Company did not receive any reports or findings related to discriminatory acts against ethnicity, race, gender, religion, political opinion, social background, or other forms of discrimination involving internal and external parties, throughout all Company's operations. The Company also supports female workers to partake menstrual leave, maternity leave, and miscarriage leave, under the provisions in the Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.229/PA-207/ASDP-2023 concerning Leave and Permission to Leave Work for Employees of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Fulfillment of Provisions Related to Child Labor and Forced Labor

In accordance with applicable labor regulations, the Company is subjected to the prohibition on employing children and engaging in forced labor. In line with these principles, the Company firmly commits to disengage employees under the permitted age and to avoid all forms of forced labor. This commitment reflects the Company's strong commitment to uphold human rights and fully comply with laws and regulations

(HAM) dan mematuhi sepenuhnya regulasi serta peraturan terkait ketenagakerjaan dan HAM. Perusahaan terus berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam perlindungan HAM, mengawasi kepatuhan terhadap regulasi, dan menciptakan budaya kerja yang mendukung kesejahteraan dan penghormatan terhadap hak-hak individu di seluruh lapisan masyarakat.

Kebebasan Berserikat dan Berkumpul

Setiap karyawan di Perusahaan memiliki hak yang sah untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat mereka. Bentuk nyata implementasi dapat dilihat pada dukungan dan dorongan yang diberikan oleh Perusahaan terhadap inisiatif para karyawan untuk membentuk organisasi Serikat Pekerja (SP) sebagai wadah untuk berekspresi bersama dan ruang aman untuk mengutarakan pendapatnya. Keberadaan serikat pekerja dianggap sebagai saluran yang sangat penting untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan antara karyawan dan manajemen, memungkinkan karyawan dengan lebih mudah menyampaikan masalah yang dihadapi di lapangan, sementara manajemen dapat memberikan respon yang memadai terhadap aspirasi karyawan. Dengan terbentuknya wadah ini, diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara karyawan dan Perusahaan, memperkuat kerja sama dan keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan organisasi.

Status karyawan di Perusahaan hingga saat ini adalah karyawan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan dan Serikat Pekerja PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Dengan adanya Serikat Pekerja ini, karyawan memiliki jalur formal untuk menyampaikan aspirasi mereka sebagai anggota organisasi pekerja yang secara resmi diwadahi oleh Perusahaan.

Perusahaan telah mengambil tindakan konkret dalam mendukung kegiatan Serikat Pekerja dengan mengembangkan hubungan industrial yang kondusif. Pendekatan ini diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada perwakilan karyawan untuk menyampaikan aspirasinya yang dicantumkan melalui PKB 2023-2025 yang secara berkala disusun ulang, ditinjau, dan ditandatangani oleh pihak manajemen Perusahaan dan Serikat Pekerja.

on employment and human rights. The Company continues to be committed to being a pioneer in protecting human rights, monitoring compliance with regulations, and creating a work culture that supports welfare and respect for individual rights at all levels of society.

Freedom of Association and Assembly

Every employee in the Company has the legal rights to associate, gather, and express their opinions. The implementation materialised in the Company's support for the employees' initiative to form a Workers Union (SP) as a forum for collective expression and a safe space to express their opinions. The Workers Union is viewed as an important channel to facilitate issues resolution between employees and management, allowing employees to easily convey issues encountered in the field, while management can provide adequate responses to employee aspirations. It is expected that this forum would help to establish good communication between employees and the Company, strengthen cooperation and active involvement in the organizational decision-making process.

The employees status working at the Company to date is employees of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), as stated in the Collective Work Agreement between the Company and the Workers Union of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Within the organization, employees have a validated channel to convey their aspirations as members of a workers' organization officially recognized by the Company.

The Company has taken concrete actions to support Workers Union's activities by building conducive industrial relations. This action transpired by presenting opportunities to employee representatives to convey their aspirations, which were then included in the 2023-2025 Collective Work Agreement as it was periodically drafted, reviewed and signed by the Company's management and the Workers' Union.

Waktu Kerja

Waktu kerja diartikan sebagai waktu karyawan melakukan pekerjaan di tempat bekerja yang ditentukan oleh Perusahaan yang dilaksanakan pada pagi, siang, dan/atau malam hari. Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait waktu kerja pegawai sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, serta ketentuan International Labor Organization (ILO). Waktu kerja di Perusahaan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama 2023-2025 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Surat Edaran No. SE.1691/OP.005/ASDP-2022 tentang Instruksi Cuti Nakhoda & KKM/Masinis I Serta Pembagian Tugas Jaga dan Rest Hour Sesuai MLC 2006. Waktu kerja dibedakan menjadi waktu kerja karyawan administrasi dan operasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

Working Hours

Working Hours is defined as the hours employees carry out work at the workplace determined by the Company, whether in the morning, afternoon, and/or evening. The Company has a policy regarding employee working time that complied with applicable policies and regulations as well as the provisions of the International Labor Organization (ILO). Working hours at the Company are regulated and outlined in the 2023-2025 Collective Work Agreement of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and Circular Letter No. SE.1691/OP.005/ASDP-2022 on Instructions on Leave for Captain & Chief/Machinists I and the Distribution of Guard Duties and Rest Hours in Accordance with MLC 2006. Working time is categorized into administrative and operational employees, with the following provisions:

Kategori Karyawan <i>Employee Category</i>	Waktu Kerja <i>Working Time</i>	Total Jam Kerja per Minggu <i>Total Working Hours per Week</i>
Karyawan administrasi <i>(non-shift)</i> Administrative employees <i>(non-shift)</i>	<ul style="list-style-type: none"> 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan waktu kerja 8 (delapan) jam 1 (satu) hari. 5 (five) working days in 1 (one) week, with 8 (eight) hours of working time in 1 (one) day. 	40 jam/minggu 40 hours/week
Karyawan operasional <i>(shift)</i> Operational employees <i>(shift)</i>	<ul style="list-style-type: none"> 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan waktu kerja 8 (delapan) jam 1 (satu) hari. 5 (five) working days in 1 (one) week, with 8 (eight) hours of working time in 1 (one) day. Pengaturan pembagian waktu kerja disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Arrangements of work time distribution are adjusted to operational needs. 	40 jam/minggu 40 hours/week
Karyawan laut Marine employees	<ul style="list-style-type: none"> Waktu kerja dan istirahat menyesuaikan jadwal operasional kapal. Work and rest times are adjusted to the ship's operational schedule. Jam istirahat minimal 10 (sepuluh) jam dalam periode 24 (dua puluh empat) jam dan dapat dibagi dua, dengan ketentuan salah satunya tidak boleh <6 (enam) jam. Minimum rest hours are 10 (ten) hours in a 24 (twenty four) hour period and can be divided into two, provided that one of them cannot be <6 (six) hours. Interval waktu istirahat tidak boleh melebihi 14 (empat belas) jam. Rest intervals must not exceed 14 (fourteen) hours. 	+/- 84 jam/minggu +/- 84 hours/week

Catatan: Tidak terdapat aturan baku terhadap perhitungan total jam kerja karyawan laut (bersifat dinamis), perhitungan jam kerja karyawan laut dilakukan berdasarkan perhitungan *gross working hour*.

Note: There is no standard rules to calculate total working hours for marine employees (dynamic), marine employees working hours is calculated as *gross working hour*.

Perusahaan menetapkan hari libur pada hari Sabtu dan Minggu, serta libur resmi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Perusahaan. Untuk karyawan operasional, diberlakukan jam kerja *shift* dengan pengaturan jam kerja dan waktu libur ditentukan berdasarkan waktu pelayanan kapal di setiap Kantor Cabang dengan mempertimbangkan operasional Perusahaan.

Perusahaan pun menyediakan berbagai macam jenis hak cuti bagi para karyawan, yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing individu. Penyediaan hak cuti ini memiliki tujuan untuk memberikan waktu istirahat setelah bekerja selama periode tertentu dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas para karyawan ketika kembali ke lingkungan kerja. Hak cuti karyawan tertuang dalam Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.229/PA-207/ASDP-2023 tentang Cuti dan Izin Meninggalkan Pekerjaan Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Beberapa jenis hak cuti yang diberikan oleh Perusahaan antara lain berupa cuti tahunan, cuti awak kapal, cuti besar, cuti haid, cuti melahirkan, cuti keguguran kandungan, cuti sakit, dan cuti di luar tanggungan Perusahaan.

Selain hak cuti, Perusahaan memberikan izin bagi karyawannya untuk meninggalkan pekerjaan dengan alasan-alasan tertentu dengan jumlah hari izin tertentu seperti izin menikah, izin menikahkan anak, izin mengkhitan anak, izin membaptis anak, dan izin lainnya yang berkaitan dengan kepentingan dan hubungan keluarga karyawan dengan batasan jumlah hari yang ditetapkan.

Perusahaan juga mengatur terkait waktu kerja lembur, di mana waktu ini adalah waktu yang dipergunakan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan melebihi waktu kerja. Waktu kerja lembur dituangkan dalam Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.361/HK.002/ASDP-2023 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.140/HK.002/ASDP-2022 tentang Waktu Kerja, Waktu Istirahat, Waktu Kerja Lembur, dan Perhitungan Upah Kerja Lembur di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

The Company sets non-working days on Saturdays and Sundays, as well as on official holidays set by the government and/or the Company. For operational employees, work shift is applied with working hours and holiday set around vessel service times at each Branch Office relating to the Company's operations.

The Company also provides various types of leave for employees, which are given according to the conditions and needs of each individual. Employee leave of absence aims to provide rest time after working for a certain period with the expectation of increased employee productivity when they return to the work environment. Employees' rights to take leave are stated in the Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.229/PA-207/ASDP-2023 concerning Leave and Permission to Leave Work for Employees in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Several types of leave rights provided by the Company include annual leave, ship crew leave, long leave, menstrual leave, maternity leave, miscarriage leave, sick leave, and leave outside the Company's coverage.

Apart from the rights to leave, the Company gives permission for employees to leave work for certain reasons for a limited number of days, such as permission in event of marriage, permission to hand their children into marriage, permission in event of children circumcision, permission in event of children getting baptized, and other permissions related to the employees interests and family relationships.

The Company also regulates overtime work, defined as time used by employees to complete work beyond working time. Overtime work is stated in the Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.361/HK.002/ASDP-2023 concerning Changes to the Decree of the Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.140/HK.002/ASDP-2022 concerning Working Time, Rest Time, Overtime Working Time, and Calculation of Overtime Wages in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

DAMPAK PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak mendapatkan pelaporan maupun keluhan dari seluruh pemangku kepentingan terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Perusahaan dan/atau karyawan Perusahaan. Perusahaan memahami pentingnya menerapkan pengembangan usaha dengan mengutamakan prinsip operasi yang adil, dan sebagai bentuk komitmennya untuk tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen tersebut berdampak pada terbangunnya hubungan baik antara organisasi dan lembaga pemerintah, serta antara organisasi dengan berbagai mitra seperti pemasok, kontraktor, pelanggan, pesaing, dan asosiasi di mana mereka berkegiatan maupun dengan karyawan secara langsung. Hubungan baik tersebut menjadi salah satu poin penting yang menunjang keberlanjutan Perusahaan di masa depan.

IMPACT OF SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN ASPECTS OF HUMAN RIGHTS ON COMPANY SUSTAINABILITY

Throughout 2023, the Company received no reports or complaints from any stakeholders regarding human rights violations committed by the Company and/or Company employees. The Company understands the importance of developing business by emphasizing fair operating principles, and thus it commits to comply with applicable laws and regulations. This commitment has impacted the forming of good relationships with government institutions, as well as with various partners such as suppliers, contractors, customers, competitors, and associations where they operate and with employees directly. The good relationship is one of the important points that supports the Company's sustainability in the future.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

SOCIAL RESPONSIBILITY ASPECTS OF EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Perusahaan memiliki komitmen yang tinggi dalam memastikan pengelolaan ketenagakerjaan yang adil dan transparan, serta memastikan kesehatan, dan keselamatan kerja dari seluruh karyawan Perusahaan. Perusahaan selalu menaati peraturan dan kebijakan yang mengatur terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja di Indonesia, serta menjadikan peraturan dan kebijakan tersebut sebagai landasan dalam menyusun peraturan dan kebijakan internal, serta program kerja terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja di Perusahaan.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Pemahaman mendalam Perusahaan terhadap keterkaitan era antara hubungan industrial dan karyawan di Perusahaan mendorong Perusahaan untuk bertekad dan berkomitmen dalam menyediakan tempat kerja yang aman dan nyaman bagi karyawan, serta menjadi tempat kerja idaman bagi karyawan. Implementasi Perusahaan terkait Tanggung Jawab Sosial aspek Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Perusahaan menetapkan kebijakan aspek Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja, yaitu:

The Company is highly committed to ensure fair and transparent employment management and occupational health, and safety of all Company employees. The Company always complies with the regulations, and policies governing Employment, Occupational Health and Safety in Indonesia, and used it to formulate internal regulations and policies as well as work programs related to same topic in the Company.

COMMITMENTS AND POLICIES

The Company's in-depth understanding of the relationship between industrial relations and employees encourages the Company to be determined and committed to providing a safe and positive workplace for employees as well as becoming an ideal workplace for employees. The Company's implementation of Social Responsibility aspects of Employment, Occupational Health and Safety refers to Law No. 1/1970 concerning Work Safety, Law No. 6/2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation Becoming Law, and Minister of Manpower Regulation No. 5/1996 concerning Occupational Safety and Health Management Systems. The Company established policies regarding Employment, Occupational Health, and Safety aspects, which include:

1. Perjanjian Kerja Bersama 2023-2025 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 2. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.20/PA.203/ASDP-2018 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 3. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.37/PA.001/ASDP-2015 tentang Pedoman Pengadaan Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 4. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.36/PA.002/ASDP-2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 5. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.95/PA.002/ASDP-2023 tentang Pendidikan Lanjutan Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 6. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.229/PA-207/ASDP-2023 tentang Cuti dan Izin Meninggalkan Pekerjaan Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 7. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.361/HK.002/ASDP-2023 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.140/HK.002/ASDP-2022 tentang Waktu Kerja, Waktu Istirahat, Waktu Kerja Lembur dan Perhitungan Upah Kerja Lembur di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
1. Collective Work Agreement 2023-2025 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 2. Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.20/PA.203/ASDP-2018 concerning Health Insurance in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 3. Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.37/PA.001/ASDP-2015 concerning Guidelines for Employee Recruitment in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 4. Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.36/PA.002/ASDP-2015 concerning Employee Education and Training Programs in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 5. Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.95/PA.002/ASDP-2023 concerning Employee Continuing Education in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 6. Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.229/PA-207/ASDP-2023 concerning Leave and Permission to Leave Work for Employees in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 7. Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.361/HK.002/ASDP-2023 concerning Changes to the Decree Board of the Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.140/HK.002/ASDP-2022 concerning Working Time, Rest Time, Overtime and Calculation of Overtime Wages in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA SDM

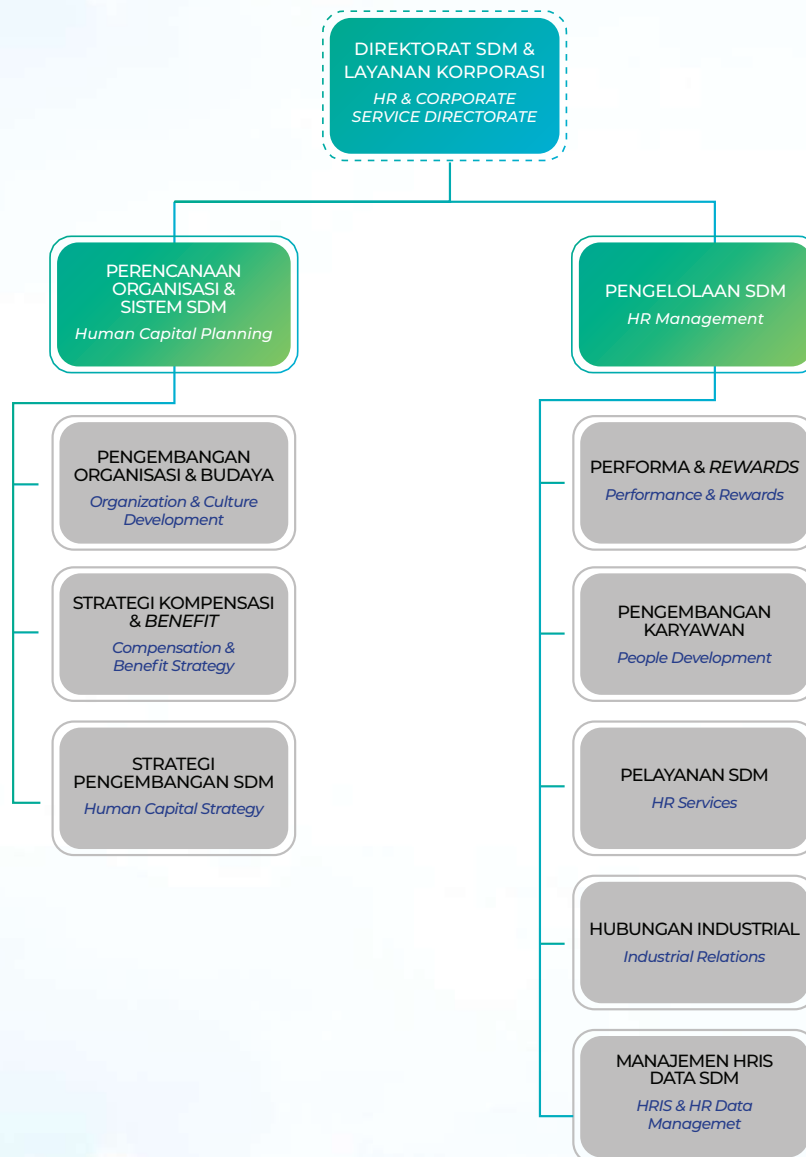
Sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap prinsip keberlanjutan, terlebih terkait SDM, Perusahaan telah menetapkan sebuah unit kerja khusus yang memiliki peran integral dalam mengelola SDM di Perusahaan. Unit kerja ini berada di bawah Direktorat Sumber Daya Manusia dan Layanan Korporasi, yaitu Divisi Perencanaan Organisasi & Sistem SDM dan Divisi Pengelolaan SDM.

HR MANAGEMENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

As part of the company's commitment to sustainability principles, especially on the subject of HR, the Company established a work unit with the essential role of managing the human resources in the Company. This work unit is under the Directorate of Human Resources and Corporate Services, namely the HR Organization & Planning Division and the HR Management Division.

Divisi Perencanaan Organisasi & Sistem SDM bertanggung jawab atas perencanaan pengelolaan SDM di Perusahaan, sedangkan Divisi Pengelolaan SDM bertanggung jawab atas implementasi pengelolaan SDM. Adapun struktur organisasi pengelola SDM di Perusahaan, yaitu sebagai berikut:

The Human Capital Planning Division is responsible for planning HR management in the Company, while the HR Management Division is responsible for implementing HR management. The organizational structure of HR management in the Company is as follows:



PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK TENAGA KERJA

Remunerasi dan Kesejahteraan

Perusahaan memandang karyawan sebagai sumber daya yang penting dan memegang peran kunci sebagai pendorong utama pertumbuhan kinerja Perusahaan. Untuk itu Perusahaan menerapkan kebijakan remunerasi sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui beberapa kebijakan yang berkaitan dengan remunerasi dan kesejahteraan karyawan. Komitmen Perusahaan terhadap kebijakan remunerasi pun menegaskan prinsip kesetaraan dan keadilan, di mana pemberian remunerasi dilakukan tanpa membedakan gender, ras, suku, dan lainnya di semua tingkat jabatan.

Komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan karyawan tercermin dalam kebijakan pemberian gaji di atas upah minimum regional (UMR). Pada tahun 2023, rata-rata rasio gaji karyawan baru dengan upah terendah dibandingkan dengan UMR mencapai 1,6 kali. Rasio tersebut menunjukkan bahwa pemberian gaji di Perusahaan berada di atas UMR dengan besaran 1,6 kali lebih besar dibandingkan UMR.

Pengembangan Kompetensi

Kehadiran SDM handal, yang dilengkapi dengan kapasitas dan kualitas yang unggul, memiliki peran krusial dalam mendukung Perusahaan mencapai tujuan strategisnya. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas seluruh karyawannya melalui program-program pendidikan dan pengembangan kompetensi yang holistik. Program ini tidak hanya diintegrasikan sebagai inisiatif untuk mencapai tujuan Perusahaan, melainkan juga dianggap sebagai hak yang melekat pada setiap karyawan. Dengan peningkatan kapasitas dan kualitas, para karyawan dapat lebih efektif mengembangkan karier mereka di lingkungan kerja Perusahaan.

IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY ON ASPECTS OF LABOR

Remuneration and Welfare

The Company regard employees as a crucial resource and playing a key role as the primary driver of the Company's performance growth. Thus, the Company implements a remuneration policy as a form of reward for employees through several policies on remuneration and employee welfare in accordance with the regulations and provisions in effect. The Company's commitment to remuneration policy also emphasizes the principles of equality and justice, where remuneration is calculated without differing gender, race, ethnicity, and other factors across all levels of position.

Commitment to fulfil employee needs is reflected in the policy of remuneration above the regional minimum wage (UMR). In 2023, the average salary ratio of new employees compared to the minimum wage was 1.6 times. This ratio shows that salaries at the Company are 1.6 times higher than the regional minimum wage.

Competency Development

Reliable human resources, prepared with outstanding capacity and quality, perform crucial roles in supporting the Company to achieve its strategic goals. Therefore, the Company is committed to continuing to grow the capacity and quality of all its employees through holistic education and competency development programs. These program would be integrated as initiatives to achieve the Company's goals, and also considered inherent rights of every employee. By increasing their capacities and qualities, employees can be more effective in developing their careers within the Company's work environment.

Pengembangan kompetensi SDM di Perusahaan mengacu dan didasari oleh Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.36/PA.002/ASDP-2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.95/PA.002/ASDP-2023 tentang Pendidikan Lanjutan Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan melaksanakan berbagai program pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk pengembangan kompetensi SDM di Perusahaan. Sebanyak 2,092 karyawan mengikuti pelatihan di sepanjang tahun 2023 dan total anggaran sebesar Rp19.063.298.628 dengan rincian sebagai berikut:

The development of HR competency in the Company refers to and is based on the Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.36/PA.002/ASDP-2015 concerning Employee Education and Training Programs in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and the Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.95/PA.002/ASDP-2023 concerning Employee Continuing Education in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Throughout 2023, the Company organized various education and training programs to develop HR competency in the Company. A total of 2.092 employees participated in training throughout 2023 and the total budget was Rp19,063,298,628, with the following details:

Uraian Description	Target Target	Realisasi Realization
Karyawan Darat Ashore Employees		
Jumlah Pelatihan Number of Training	186	136
Durasi Pelatihan (dalam jam) Training Duration (in hours)	132.664	129.384
Jumlah Peserta Number of Participants	1.793	1.238
Biaya Pelatihan Training Costs	Rp16.825.414.379	Rp15.663.592.710
Karyawan Laut Marine Employees		
Jumlah Pelatihan Number of Training	42	18
Durasi Pelatihan (dalam jam) Training Duration (in hours)	64.764	21.440
Jumlah Peserta Number of Participants	2.245	854
Biaya Pelatihan Training Costs	Rp3.937.650.000	Rp3.399.705.918

Survei Kepuasan dan Keterikatan Karyawan

Perusahaan dengan tegas memandang Survei Kepuasan dan Keterikatan Karyawan sebagai salah satu wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap aspek tenaga kerja. Melalui survei ini, Perusahaan berkomitmen untuk terus memahami dan meningkatkan kesejahteraan serta kepuasan karyawan, sekaligus membangun keterikatan yang kuat antara karyawan dan Perusahaan. Hasil survei pada tahun 2023 menunjukkan pencapaian yang membanggakan, dengan Indeks Kepuasan sebesar 4,02, mengalami kenaikan sebesar 0,36 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Employee Satisfaction and Engagement Survey

The Company firmly views the Employee Satisfaction and Engagement Survey as a form of social responsibility implementation as it relates to of labor. Through the surveys, the Company is committed to continuously understand and improve employee welfare and satisfaction, whilst building a strong engagement between employees and the Company. The survey results in 2023 showed encouraging achievements, with Satisfaction Index of 4.02, an increase of 0.36 points compared to the previous year. Likewise, the Engagement Index reached 4.21, an increase of 0.01 points from the previous year.

Begitu juga dengan Indeks Keterlekatan yang mencapai angka 4,21, meningkat sebesar 0,01 poin dari tahun sebelumnya. Kedua indikator ini masuk dalam kategori PUAS, mencerminkan keberhasilan Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerjanya yang memotivasi dan memenuhi harapan karyawan. Hasil survei ini tidak hanya menjadi acuan bagi perbaikan berkelanjutan di masa depan, tetapi juga memperkuat komitmen Perusahaan dalam memberdayakan sumber daya manusia dan menciptakan hubungan kerja yang berkelanjutan.

Turnover Karyawan

Rasio pergantian karyawan juga mencerminkan budaya dan sistem kerja organisasi, dapat dianggap sebagai petunjuk keberhasilan dalam membentuk lingkungan kerja yang mendukung. Selain itu, rasio pergantian karyawan dapat mengindikasikan produktivitas dan kesetiaan SDM. Terhitung hingga akhir tahun 2023, Perusahaan memiliki *turnover rate* sebesar 3,1%. Perusahaan mencatat pengurangan karyawan dengan total 151 karyawan, dengan rincian sebagai berikut:

The two indexes fall in the SATISFIED category, reflecting the Company's success in building a motivating work environment that meets employee expectations. The survey results served as a point for future continuous improvement, and to strengthen the Company's commitment to empower employees and create sustainable working relationships.

Employee Turnover

The employee turnover ratio also reflects the organization's culture and work system, and can be considered an indicator of success in establishing a supportive work environment. Moreover, employee turnover ratio can indicate employee productivity and loyalty. As of the end of 2023, the Company has a turnover rate of 3.1%. The record showed that the number of employees who departed totalled at 151 persons, with the following details:

Penyebab Pengurangan <i>Causes of Turnover</i>	Jumlah Karyawan <i>Number of Employees</i>
Meninggal dunia <i>Passed Away</i>	3
Mengundurkan diri <i>Resign</i>	50
Mangkir <i>Absent</i>	23
Sakit Berkepanjangan <i>Medical Leave</i>	5
Bersifat Mendesak <i>Urgent</i>	7
Pelanggaran Disiplin <i>Disciplinary Violations</i>	3
Pensiun <i>Retired</i>	57
Penugasan ke Anak Perusahaan <i>Assigned to Subsidiaries</i>	3
Total	151

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Pelaksanaan program terkait TJSL merupakan suatu tanggung jawab yang diemban oleh seluruh karyawan Perusahaan. Sebagai bagian dari komitmen Perusahaan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, Perusahaan telah menetapkan sebuah satuan kerja khusus yang memiliki peran integral dalam merancang, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi program-program TJSL. Satuan khusus ini beroperasi di bawah dua direktorat yang berbeda, mencerminkan kompleksitas dan keragaman tanggung jawab.

Pertama-tama, terdapat satuan kerja yang berada di bawah Direktorat SDM dan Layanan Korporasi, yang bertugas untuk memantau dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan karyawan. Fokus utama dari direktorat ini adalah memastikan bahwa setiap inisiatif TJSL mendukung dan meningkatkan standar keselamatan serta kesejahteraan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang aman, dan mendukung perkembangan profesional.

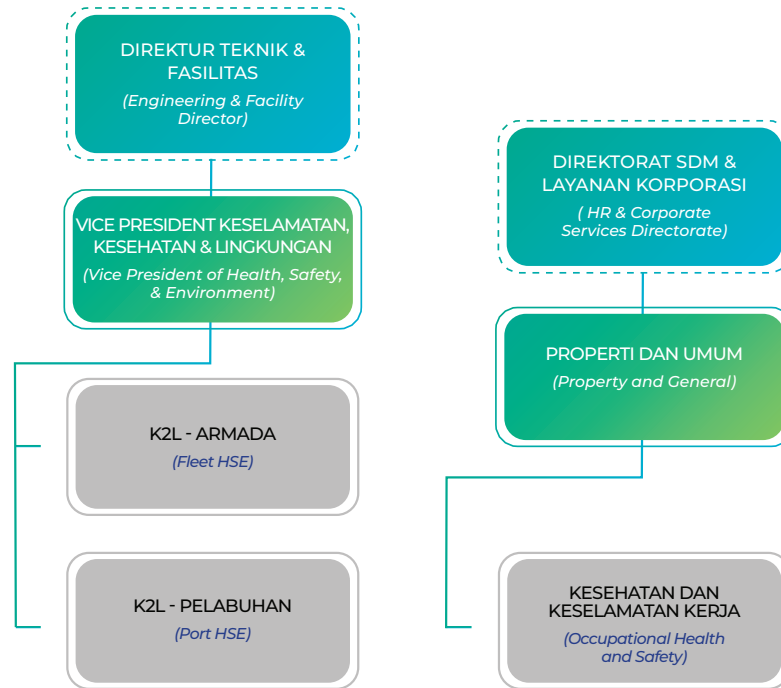
Selanjutnya, terdapat satuan kerja lainnya yang tergabung dalam bagian Direktorat Teknik dan Fasilitas. Satuan kerja ini secara khusus bertanggung jawab dalam menjalankan operasi keselamatan yang terfokus pada aspek keamanan kapal dan perlindungan lingkungan pelabuhan. Adapun struktur organisasi pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja di Perusahaan yaitu sebagai berikut:

ORGANIZATIONAL STRUCTURE FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT

Implementation of CSR-related programs is a responsibility carried out by every Company's employees. As part of the Company's commitment to sustainability principles, the Company has assigned a designated work unit with an integral role in designing, coordinating, and evaluating CSR programs. This unit operates under two different directorates, reflecting the complexity and diversity of their responsibilities.

Firstly, there is a work unit under the Directorate of HR and Corporate Services that is tasked to monitor and supervise activities related to employee safety and welfare. The main focus of this directorate is to ensure that every CSR initiative supports and improves safety standards and employee welfare, creates a safe work environment, and supports professional development.

Furthermore, there are other work units that are positioned under of the Engineering and Facilities Directorate. The work units are specifically responsible for carrying out safety operations that focus on aspects of vessels security and port environmental protection. The organizational structure of occupational health and safety management in the Company is as follows:



PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Program Kerja Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Selama tahun 2023, Perusahaan telah melaksanakan sejumlah inisiatif pengelolaan terkait aspek kesehatan dan keselamatan kerja guna meningkatkan standar dan keberlanjutan lingkungan kerja. Berbagai program tersebut dirancang dengan cermat dan secara komprehensif untuk mencakup berbagai aspek yang relevan yang terdiri dari:

1. Pengukuran Lingkungan Kerja dan Sertifikasi Alat Keselamatan di Pelabuhan yang telah tersertifikasi SMK3;
2. Melakukan latihan kebakaran di Gedung Kantor Pusat;
3. Latihan keadaan darurat untuk seluruh kapal sesuai jenis kapal;
4. *Top Drill* gabungan antara Kantor Cabang dan Kapal;
5. Pengukuran *Safety Assessment* Perusahaan;
6. Melakukan penilaian implementasi dan audit internal terhadap Sistem Manajemen Keselamatan/ISM-Code;

IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY ASPECTS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Occupational Health and Safety Work Program

During 2023, the Company has implemented numerous management initiatives related to occupational health and safety aspects to improve work environment standards and sustainability. These various programs were designed carefully and comprehensively to cover various relevant aspects consisting of:

1. Conducted Evaluation of the Work Environment and Certification of Safety Equipment in Ports that had been certified with SMK3 (Occupational Health and Safety Management System);
2. Conducted fire drills at the Head Office Building;
3. Exercised emergency drills for all ships according to ship types;
4. Exercised combined Top Drill between Branch Offices and Ships;
5. Measured Company Safety Assessment;
6. Conducted implementation assessments and internal audits of the Safety Management System/ISM-Code;

- | | |
|--|--|
| <p>7. Melakukan pembaharuan <i>Safety Management Certificate</i> (SMC);</p> <p>8. <i>Medical Check Up</i> setahun sekali terhadap karyawan darat untuk Cabang.</p> | <p>7. Renewed the <i>Safety Management Certificate</i> (SMC);</p> <p>8. Annual <i>Medical Check Up</i> for ashore employees at Branch Offices.</p> |
|--|--|

KINERJA KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Perusahaan telah berdedikasi dan berupaya sepenuh hati dalam melaksanakan berbagai program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sepanjang tahun 2023 dengan tujuan utama untuk mencapai tingkat nol kecelakaan kerja dan mencegah terjadinya kasus penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Upaya kolaboratif dan dedikasi yang tinggi dari seluruh personel Perusahaan dalam menerapkan langkah-langkah proaktif untuk K3 telah menghasilkan pencapaian yang optimal.

Dari aspek keselamatan operasional kapal, pada tahun 2023 Perusahaan mencatatkan indeks *Rate of Accident* (RoA) sebesar 0,17 lebih rendah dibandingkan indeks RoA tahun lalu 2022 yaitu 0,20. Sementara itu dari aspek keselamatan karyawan, Perusahaan melakukan pengukuran *Incident Rate* (IR) yang mengukur persentase jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja untuk setiap karyawan. Pada tahun 2023, *incident rate* di Perusahaan tercatat sebesar 0,02%.

DAMPAK PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Selama tahun 2023, tidak ada laporan resmi yang diajukan baik oleh karyawan maupun pihak-pihak terkait mengenai dampak negatif yang mungkin timbul dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, tidak terdapat sanksi atau denda yang dikenakan sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini mencerminkan program kerja yang dilakukan mampu memberikan dampak positif bagi Perusahaan sehingga operasional Perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PERFORMANCE

The Company has dedicated and made endeavours to implement various Occupational Safety and Health (OSH) programs throughout 2023, with the main objective of achieving zero work accident and preventing cases of disease caused by the work environment. Collaborative efforts and high dedication from all Company personnel in implementing proactive steps for OSH had resulted in optimal achievements.

In the aspect of ship operational safety, in 2023 the Company recorded a *Rate of Accident* (RoA) index of 0.17, lower than the 2022 RoA index of 0.20. Meanwhile, in the aspect of employee safety, there is Company's the *Incident Rate* (IR), which measures the percentage of work accidents that occur in the workplace for each employee. In 2023, the incident rate at the Company was recorded at 0.02%.

IMPACT OF THE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASPECTS

Throughout 2023, there were no official reports submitted by neither employees nor related parties regarding the negative impacts that may have arisen from the company's operational activities. In addition, there were no sanctions or fines imposed as a consequence of violations of applicable laws and regulations, especially those relating to occupational health and safety aspects. This reflected that the work program carried out was able to impact positively on the Company such that the Company's operations can run smoothly without significant obstacles.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

SOCIAL RESPONSIBILITY ASPECTS OF SOCIAL AND COMMUNITY

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

ASDP berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan sosial kemasyarakatan sebagai bentuk upaya menjaga keberlangsungan lingkungan serta memberikan sumbangsih kepada masyarakat di wilayah operasional Perusahaan. Upaya tersebut diwujudkan dengan melaksanakan program-program tanggung jawab sosial masyarakat secara berkelanjutan dan konsisten yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, baik dalam bentuk donasi maupun aksi langsung.

Upaya Perusahaan dalam memenuhi komitmen tanggung jawab sosial masyarakat dibuktikan dengan perancangan program TJSL dengan memenuhi 4 (empat) prinsip yang tertera pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Adapun prinsip tersebut antara lain:

1. Terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan;
2. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan Perseroan;
3. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan Perseroan; dan
4. Akuntabilitasyaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

COMMITMENTS AND POLICIES

ASDP is committed make continuous contribution to community development in efforts to maintain environmental sustainability and contribute to the community around the Company's operational areas. These endeavors were realized through thorough implementation of community programs in a sustainable and consistent manner. Programs are consistently carried out every year, through donations and direct actions.

The Company's efforts to fulfil its commitment of social responsibility to the community is proven by designing the CSR program to meet all 4 (four) principles stated in Regulation of Minister of SOEs No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises. These principles are:

1. Integrated, based on risk analysis and business processes that are associated to stakeholders;
2. Directional, having a clear direction to achieve the Company's goals;
3. Measurable impact, which is to contribute and provide benefits that produce change or added value for the stakeholders and the Company; and
4. Accountability, which is being accountable to avoid potential abuse and irregularities.

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah melaksanakan program TJSI aspek sosial dan kemasyarakatan yang terdiri dari:

Pilar Pembangunan Sosial

1. Bantuan santunan anak yatim dan dhuafa;
2. Bantuan sembako untuk masyarakat di Karimun Jawa, Merak, Sumbawa Barat, dan Jakarta;
3. Bantuan kegiatan kurban Hari Raya Idul Adha di Kawasan BHC Pelabuhan Bakauheni;
4. Mudik Bersama dan Mudik Gratis bersama BUMN di Banten, Jakarta, Ambon, dan Maluku;
5. Kolaborasi BUMN Pelita Warna di Lapas Kelas I Cipinang;
6. Bantuan program insidental tahap III Pemuda Langsa Bersatu berupa bantuan sembako;
7. Bantuan pendanaan kegiatan keagamaan di Bakauheni.

Pilar Pembangunan Ekonomi

1. Dukungan dalam bentuk sponsorship untuk kegiatan seminar, pelatihan dan workshop kewirausahaan di Banda Aceh dan Banten;
2. Partisipasi Festival Parekraf Lampung 2023;
3. Bantuan dana UMKM di Kota Sabang dan Banyuwangi;
4. Bantuan pelabuhan penyeberangan milik BPTD XXII di Bitung, Sulawesi Utara.

Pilar Lingkungan

1. Penyediaan air bersih melalui pembuatan sumur air bersih dan penyediaan sanitasi layak di Merak, Banten dan Raja Ampat, Papua;
2. Pembangunan infrastruktur keagamaan di Banyuwangi, Batam, Kepulauan Riau, Banten, Jember, dan Bali;
3. Pengadaan mesin pengolahan plastik BUMDes Bina Warga Desa Pasuruan, Kec. Penengahan, Lampung Selatan;
4. Kolaborasi BUMN penanaman pohon di Mandalika, Lombok;
5. Program penanaman mangrove "Madura Moljeh Asreh" di Sampang, Jawa Timur;

IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN ASPECTS OF SOCIAL AND COMMUNITY

Throughout 2023, the Company had implemented the CSR program on social and community aspects, which consisted of:

Pillars of Social Development

1. Donation for the orphans and impoverished;
2. Aid of basic goods for communities in Karimun Jawa, Merak, West Sumbawa and Jakarta;
3. Aid for Eid al-Adha sacrifice activities in the BHC area, Bakauheni Port;
4. Joint Homecoming and Free Homecoming program with SOEs in Banten, Jakarta, Ambon, and Maluku;
5. Pelita Warna program in collaboration with SOEs in Cipinang Class I Penitentiary;
6. Aid for the 3rd phase circumstantial program for the Langsa Youth in the form of basic goods;
7. Funding aid for religious activities in Bakauheni.

Pillars of Economic Development

1. Support by sponsorship for seminars, training and entrepreneurship workshops in Banda Aceh and Banten;
2. Participation in the 2023 Lampung Tourism and Creative Economy Festival;
3. Funding assistance for MSMEs in Sabang and Banyuwangi;
4. Assistance to the ferry port owned by BPTD XXII in Bitung, North Sulawesi.

Pillar of Environments

1. Provision of clean water through clean water wells construction and provision of adequate sanitation in Merak, Banten and Raja Ampat, Papua;
2. Development of religious infrastructure in Banyuwangi, Batam, Riau Islands, Banten, Jember, and Bali;
3. Procurement of plastic processing machines for Village-Owned Enterprises for the Community Development of Pasuruan Village, Penengahan District, South Lampung;
4. SOEs collaboration to plant trees in Mandalika, Lombok;
5. "Madura Moljeh Asreh" mangrove planting program in Sampang, East Java;

6. Program insidental di Banten, Bali, dan Nanggroe Aceh Darussalam.

6. Circumstantial programs in Banten, Bali, and Nanggroe Aceh Darussalam.

DAMPAK OPERASI TERHADAP MASYARAKAT

Dalam realisasinya, Perusahaan telah membawa dampak yang signifikan kepada masyarakat sekitar. Melalui inisiatif-inisiatif seperti dukungan pengembangan ekonomi lokal, akses terhadap pendidikan, dan pemberian fasilitas kesehatan, Perusahaan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus dengan memberikan dukungan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dan sumber daya lokal. Program ini tidak hanya meningkatkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial, tetapi juga menciptakan kesadaran dan tanggung jawab sosial yang lebih besar di antara warganya.

Selain itu, Perusahaan berperan dalam pengentasan ketidakesetaraan dengan memberikan akses dan fasilitas yang lebih baik terhadap UMKM, layanan kesehatan, dan pendidikan. Dengan pendekatan yang holistik, Perusahaan telah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan komunitas secara menyeluruh, menjadikannya sebuah upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai aspek.

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN DAN KONFLIK SOSIAL KEMASYARAKATAN

Dalam rangka membangun hubungan baik dengan masyarakat, Perusahaan terus berupaya memfasilitasi akses komunikasi yang efisien untuk terus meningkatkan penanganan keluhan. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau keluhan melalui platform WBS Perusahaan maupun penyampaian secara langsung kepada pengelola WBS dan humas di setiap kantor cabang. Perusahaan secara aktif melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap pengaduan yang masuk untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti secara transparan. Perusahaan juga memiliki mekanisme dan perangkat keadaan darurat dan konflik sosial kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IMPACT OF OPERATIONS ON COMMUNITY

In its realization, the Company brought significant impact on the surrounding communities. Through initiatives of, for example, supporting local economic development, opening access to education, and providing health facilities, the Company contributed tangibly to improve the community's quality of life. Focus was also put into community empowerment by providing support and trainings to develop local skills and resources. This program not only increased community involvement in social activities, but also creates greater social awareness and responsibility among the community.

In addition, the Company took roles in reducing inequalities by providing better access and facilities to MSMEs, health services, and education. With a holistic approach, the Company created a supportive environment towards general community development, triggering a greater drive to improve the communities' quality of life in many aspects.

MECHANISM FOR HANDLING COMPLAINTS AND SOCIAL CONFLICTS

In order to build good relations with the community, the Company continues to facilitate efficient communication access to improve complaint handling. The public can submit complaints through the Company's WBS platform or submit them directly to the WBS manager and public relations unit at each branch office. The Company actively reviews and evaluates incoming complaints and follows it up in transparent manner. The Company has also put in place mechanisms and instruments for emergencies and social conflicts in accordance with applicable regulations.

DAMPAK PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN TERHADAP KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN

Dengan berfokus melalui kontribusi positif kepada kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan komunitas, Perusahaan telah berupaya menjadi agen perubahan yang peduli terhadap isu-isu sosial. Jejak rekam positif ini menciptakan citra perusahaan sebagai mitra yang bertanggung jawab dan memperkuat ikatan antara perusahaan dan komunitas di wilayah operasional Perusahaan, hal ini mendukung keberlanjutan bisnis Perusahaan dalam jangka panjang dan menciptakan hubungan kerja sama Perusahaan dengan masyarakat yang berkelanjutan.

BIAYA PROGRAM KERJA TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Perusahaan telah merealisasikan program kerja tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan dengan biaya sebesar Rp8,4 miliar di tahun 2023. Jumlah tersebut terbagi ke dalam beberapa pilar TJSL yang rinciannya dapat dilihat pada tabel Pencapaian Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2023 pada bagian Strategi TJSL dalam Laporan Tahunan ini.

IMPACT OF THE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN ASPECTS OF SOCIAL AND COMMUNITY TOWARDS COMPANY SUSTAINABILITY

By focusing on positive contributions to community welfare and community empowerment, the Company becomes an agent of change that concerns about social issues. This positive track record helped shape the Company's image as a responsible partner. It also strengthens the ties between the Company and the communities surrounding the Company's operational areas, that will support Company's long-term business sustainability and creates a lasting cooperative relationships between the Company and the communities.

COSTS OF THE WORK PROGRAM FOR SOCIAL RESPONSIBILITY IN ASPECTS OF SOCIAL AND COMMUNITY

The Company has implemented a social community responsibility work program totaling at Rp8.4 billion in 2023. This amount was divided into several CSR pillars, with detailed breakdowns illustrated in the table of 2023 Achievements of Social and Environmental Responsibility Program contained in the CSR Strategy section in this year's report.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK PRODUK DAN/ATAU JASA SERTA PELANGGAN

SOCIAL RESPONSIBILITY ASPECTS OF PRODUCTS AND/OR SERVICES AND CUSTOMERS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Menjaga kepuasan konsumen merupakan komitmen Perusahaan dalam mengelola bisnis dan operasional Perusahaan. Oleh karena itu, komitmen tersebut diwujudkan dengan terus berinovasi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pelanggan. Untuk memperkuat pelayanan yang diberikan, Perusahaan juga terus berupaya memperbaiki serangkaian kebijakan manajemen terkait aspek tingkat layanan dan pengaduan konsumen. Adapun kebijakan Perusahaan terhadap standar layanan sebagai berikut:

1. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.226/HK.002/ASDP-2023 tentang Standar *Hospitality Frontliners* di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan perbaikan pelayanan yang berkelanjutan, serta menjadi acuan bagi Perusahaan dalam melaksanakan pelatihan *frontliners* dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa;
2. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.217/OP.204/ASDP-2022 tentang Desain *Service Touch Point* di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan dan pola interaksi dengan pengguna jasa, serta menjadi panduan dalam penyelenggaraan, *monitoring*, dan perbaikan atas kualitas pelayanan yang konsisten;
3. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.437/Hk/002/ASDP-2023 Tentang *Service Recovery Guidance* di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

COMMITMENTS AND POLICIES

Maintaining customer satisfaction is the part of commitment in managing the Company's business and operations. This commitment can be realized by continuous innovation to meet customer's needs and demands. To improve the services provided, the Company continues to improve management policies related to aspects of service levels and consumer complaints. The Company's policy regarding service standards is as follows:

1. Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.226/HK.002/ASDP-2023 concerning Standards for *Hospitality Frontliners* in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), which aims to increase professionalism and continuous service improvement, and be set as the Company's reference for carrying out frontliner training to improve the service quality to customers.
2. Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.217/OP.204/ASDP-2022 concerning *Service Touch Point Design* in the PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), which aims to ensure implementation and interaction patterns with service users, and be the guide in organizing, monitoring and improving consistent service quality.
3. Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.437/Hk/002/ASDP-2023 concerning *Service Recovery Guidance* within PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK PRODUK DAN/ATAU JASA SERTA PELANGGAN

Perusahaan terus berupaya memberikan nilai tambah bagi pelanggan untuk mewujudkan kelangsungan usaha yang berkelanjutan. Inisiatif yang dilakukan Perusahaan dalam mengelola kepuasan konsumen antara lain melalui kegiatan survei kepuasan pelanggan yang dilakukan secara rutin, penyediaan sarana komunikasi pelanggan di berbagai sosial media untuk menyampaikan hal-hal terkait produk dan layanan Perusahaan serta penanganan keluhan pelanggan melalui *contact center* yang tersedia dalam 24 jam selama 7 hari. Di samping itu, Perusahaan secara rutin juga melaksanakan beberapa *event* untuk membangun hubungan dengan pelanggan seperti event Hari Pelanggan Nasional, hari besar nasional hingga *event* di sosial media.

Perusahaan memiliki komitmen tinggi dalam memberikan kualitas layanan terbaik yang mengacu pada beberapa kebijakan dan pedoman berikut:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 62 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan;
2. KD.267/HK.101/ASDP-2017 tentang Standar Pelayanan dan Fasilitas Kapal PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
3. KD.268/HK.101/ASDP-2017 tentang Standar Pelayanan dan Fasilitas Pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
4. KD.217/OP.204/ASDP-2022 tentang Desain Service Touch Point di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
5. KD.226/HK.002/ASDP-2023 tentang Standar Hospitality Frontliners di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Selain berpedoman pada aturan tersebut, Perusahaan juga turut aktif dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB serta Pelayanan Prima yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN ASPECTS OF PRODUCTS AND/OR SERVICES AND CUSTOMERS

The Company strives to provide added value for customers to build sustainable business continuity. Initiatives carried out by the Company in managing customer satisfaction include routine customer satisfaction surveys, set up customer communication channel on various social media to inform about Company's products and services as well as handling of customer complaints through a 24/7 contact center. Aside from that, the Company also regularly organized events to build relationships with customers, such as events on National Customer Day, events on national holidays, and events and quizzes on social media.

The Company is highly committed to provide the best quality service, which refers to the following policies and guidelines:

1. Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. PM 62 of 2019 concerning Minimum Service Standards for Ferry Transport;
2. KD.267/HK.101/ASDP-2017 concerning Service Standards and Ship Facility for PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
3. KD.268/HK.101/ASDP-2017 concerning Service Standards and Port Facility for PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
4. KD.217/OP.204/ASDP-2022 concerning Service Touch Point Design within PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
5. KD.226/HK.002/ASDP-2023 concerning Standards for Frontliners Hospitality within PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Apart having these guidelines, the Company also actively participated in Monitoring and Evaluation of Public Service Delivery Performance (PEKPPP), which is activities organized by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform as well as Excellent Services concept from the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

Pengukuran Kepuasan Pelanggan dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali dengan melibatkan konsultan eksternal untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan sekaligus menyaring masukan dari pelanggan. Hasil survei kepuasan pelanggan menjadi dasar bagi Perusahaan untuk melakukan peningkatan layanan kepada pelanggan yang akan dituangkan dalam program kerja dan penyempurnaan kebijakan maupun standar layanan Perusahaan. Pada tahun 2023, Perusahaan melakukan survei kepuasan pelanggan oleh pihak independen dengan capaian skor kepuasan pelanggan mencapai 5,34. Skor ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 5,31.

MEKANISME PENGADUAN KELUHAN PELANGGAN

Keluhan dan masukan pelanggan merupakan suatu hal yang dianggap berharga bagi Perusahaan karena dapat menjadi dasar evaluasi atas kualitas layanan yang diberikan Perusahaan. Untuk memfasilitasi pengaduan keluhan pelanggan, Perusahaan menyediakan *contact center* yang tersedia selama 24 jam yang sigap dalam menangani keluhan pelanggan. Selain itu, Perusahaan juga mulai menempatkan *customer service* di 4 (empat) pelabuhan yaitu Pelabuhan Merak (Eksekutif dan Reguler), Pelabuhan Bakauheni (Eksekutif dan Reguler), Pelabuhan Ketapang, dan Pelabuhan Gilimanuk, yang secara langsung dapat berkomunikasi dengan pelanggan baik untuk pengaduan keluhan sekaligus penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pelanggan sehingga setiap keluhan pelanggan dapat secara langsung diselesaikan oleh Perusahaan.

Segala bentuk keluhan dan pengaduan dapat disampaikan melalui saluran yang telah disediakan pada *contact center* (021) 191 atau 08111-021191, serta melalui email cs@indonesiaferry.co.id atau cs@asdp.id.

Seluruh pelaporan yang masuk akan diterima oleh Divisi Pelayanan Pelanggan dan segera ditindaklanjuti oleh divisi dan cabang terkait. Pengaduan secara langsung juga dapat dilakukan baik melalui petugas di lapangan, kantor cabang, maupun kantor pusat.

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

Customer Satisfaction Assessment is performed annually by appointing external consultants to measure the customer satisfaction level and screen suggestions from customers. The Company uses the customer satisfaction survey results as the basis to improve services to customers, which will be outlined in the Company's work programs, policies improvements, and service standards. In 2023, survey conducted by the independent party resulted in a customer satisfaction score of 5.34. This score increased compared to 2022, of 5.31.

CUSTOMER COMPLAINT MECHANISM

Customer complaints and suggestions are deemed valuable for the Company as they serve as the basis for service quality evaluation the Company had provided. To facilitate customer complaints, the Company set up a 24-hour contact centre to promptly handle customer complaints. Apart from that, the Company has also started to establish customer service at 4 (four) ports, namely Merak Port (Executive and Regular), Bakauheni Port (Executive and Regular), Ketapang Port, and Gilimanuk Port, where the customers can directly express their complaints or having their problems promptly resolved by the Company.

All forms of complaints and grievances can be submitted through the channels provided, which are the contact center at (021) 191 or 08111-021191, and by email at cs@indonesiaferry.co.id or cs@asdp.id.

All incoming reports will be received by the Customer Service Division and will immediately be followed up by the relevant division and branch. Direct complaints can also be delivered through officers in the field, branch offices or head office.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

SOCIAL RESPONSIBILITY ON ENVIRONMENTAL ASPECTS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan hidup. Perusahaan senantiasa berkomitmen memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemenuhan standar lingkungan hidup yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Perusahaan terus berupaya meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia guna merealisasikan prinsip keberlanjutan yang terarah, terukur, dan terintegrasi sehingga pihak yang terdampak dapat merasakan manfaat yang maksimal. Di samping itu, komitmen Perusahaan terkait keberlanjutan lingkungan hidup diatur dalam Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.34/HK.002/ASDP/2014 tentang Pemberlakuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan dan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

Untuk menerapkan program tanggung jawab lingkungan hidup secara komprehensif, Perusahaan juga telah membentuk Prosedur Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prosedur ini meliputi pencegahan pencemaran dan perlindungan lingkungan hidup yang memuat kajian evaluasi terhadap kegiatan yang berjalan.

ISU-ISU DAN RISIKO LINGKUNGAN HIDUP YANG RELEVAN DENGAN PERUSAHAAN

Dalam menjalankan aktivitas operasional, Perusahaan dihadapkan pada sejumlah isu dan risiko terkait dengan lingkungan hidup. Terlebih,

COMMITMENTS AND POLICIES

Environmental protection and management requires systematic and integrated efforts of environmental preservation. The Company is always committed to contribute significantly to fulfil sustainable environmental standards. Therefore, the Company continues to improve good corporate governance and develop human resource competencies in order to bring about directed, measurable, and integrated sustainability principles such that the affected parties can gain the maximum benefits. Aside from that, the Company's commitment to environmental sustainability is regulated in the Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.34/HK.002/ASDP/2014 concerning Implementation of Safety and Environmental Protection Management Systems and Environmental Evaluation Documents (DELH).

To implement a comprehensive environmental responsibility program, the Company also established a Procedure of Environmental Document in accordance with Law No. 32/2009 concerning Environmental Protection and Management. The procedure contains prevention of pollution and environmental protection with an evaluation review of ongoing activities.

ENVIRONMENTAL ISSUES AND RISKS RELEVANT TO THE COMPANY

In carrying out operational activities, the Company is faced with issues and risks related to the environment. Moreover, the Company's operations are carried out on land and in sea

operasional Perusahaan dilakukan di darat dan di wilayah laut sehingga risiko terhadap lingkungan laut menjadi cukup signifikan. Perusahaan telah memetakan berbagai isu dan risiko lingkungan hidup yang relevan dengan Perusahaan antara lain:

1. Potensi risiko pencemaran lingkungan dari aktivitas operasional kapal berupa emisi gas buang kapal;
2. Potensi risiko pencemaran lingkungan akibat tumpahan BBM kapal;
3. Potensi risiko pencemaran lingkungan akibat limbah B3 dan Non-B3 yang dihasilkan dari aktivitas operasional di kapal maupun pelabuhan.

regions, thus the risk to the marine environment can be quite significant. The Company has mapped various environmental issues and risks that are relevant to the Company, including:

1. Potential risk of environmental pollution from ship operational activities, in form of ship exhaust emissions;
2. Potential risk of environmental pollution due to ship fuel spills;
3. Potential risk of environmental pollution due to Toxic and Hazardous Materials (B3), and Non-Toxic Non-Hazardous Materials (non-B3 waste) resulted from operational activities on ships and ports.

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

Pelaksanaan tanggung jawab lingkungan merupakan bentuk komitmen Perusahaan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan lingkungan guna mewujudkan kegiatan operasional yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, di tahun 2023 Perusahaan telah merealisasikan program-program tanggung jawab lingkungan hidup yang meliputi pengelolaan energi, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan emisi udara, dan pengelolaan limbah.

PENGELOLAAN ENERGI

Dalam rangka mewujudkan perusahaan yang peduli terhadap keberlangsungan hidup, Perusahaan berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan energi baik dalam operasional kantor, operasional pelabuhan, maupun operasional penyeberangan. Perusahaan telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi penggunaan energi listrik sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan efisiensi operasional. Di antara langkah-langkah tersebut, Perusahaan telah mengimplementasikan sistem manajemen BBM di seluruh kapal melalui Aplikasi Sistem *Monitoring* Konsumsi BBM, kebijakan pengurangan penggunaan lampu pada siang hari, menggunakan lampu ramah lingkungan,

IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN ENVIRONMENTAL ASPECTS

Carrying out environmental responsibility is the Company's way to fulfil commitment to comply with laws and regulations in environmental protection towards sustainable operational activities. To bring this about, in 2023 the Company carried out environmental programs that comprised of energy management, water resources management, air emissions management, and waste management.

ENERGY MANAGEMENT

In order to build a company that is concerned about the conditions related to sustainable living, the Company endeavors to optimize energy use in office operations, port operations and ferry operations. The Company has taken concrete steps to reduce electrical energy use as part of its commitment to environmental sustainability and operational efficiency. Among the measures taken, the Company has implemented a fuel management system on all ships through the application of Fuel Consumption Monitoring System, a policy to reduce lightings during the day, installation of eco-friendly bulbs, relevant division and branch. switched off the air

serta mematikan sistem pendingin udara dan pencahayaan ruangan setelah waktu operasional selesai menggunakan teknologi otomatisasi yang membantu mengoptimalkan penggunaan energi. Upaya-upaya ini tidak hanya mendukung tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan, tetapi juga menciptakan efisiensi biaya melalui pengurangan konsumsi energi.

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan melakukan pencatatan konsumsi energi BBM untuk operasional kapal yang tercatat sebesar 72.311 kiloliter, menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 74.022 kiloliter. Penurunan konsumsi BBM tersebut didorong oleh berbagai program kerja penghematan energi yang dilakukan secara konsisten di seluruh lini Perusahaan.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Perusahaan telah mengambil inisiatif aktif untuk mengurangi penggunaan air dengan menerapkan kebijakan dan teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Sebagai contoh, Perusahaan telah menggunakan kran air otomatis untuk mengontrol dan mengurangi pemakaian air. Selain itu, Perusahaan juga berusaha meningkatkan kesadaran karyawan dalam penggunaan air yang bijak melalui pamflet, *campaign* video, dan sosialisasi melalui *email*. Perusahaan tidak hanya mengurangi biaya operasional tetapi juga aktif berpartisipasi untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan air bersih dan membangun budaya bijak menggunakan air.

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan mencatat penggunaan air untuk operasional kapal yaitu sebesar 1,339,030 m³, meningkat dibandingkan penggunaan air di tahun 2022 sebesar 1,246,192 kiloliter. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan jumlah trip di hampir seluruh lintasan Perusahaan.

PENGELOLAAN EMISI UDARA

Perusahaan menyadari bahwa aktivitas operasional kapal merupakan salah satu penyumbang emisi yang cukup signifikan bagi lingkungan. Untuk itu, Perusahaan melakukan pengelolaan dan pengendalian emisi yang

conditioning and lighting system after end of operational hours using automation technology that helps optimize energy use. These efforts not only support corporate social responsibility towards the environment, but also increase cost efficiencies through reduced energy consumption.

Throughout 2023, the Company recorded fuel energy consumption for ship operations at 72,311 kilolitres, a decrease compared to 2022 of 74,022 kilolitres. The reduction in fuel consumption was driven by consistent energy saving work programs carried out across the Company.

WATER RESOURCES MANAGEMENT

The Company has taken active initiatives to reduce water use by implementing policies and technologies that support environmental sustainability. For example, the Company installed automatic water taps to control and reduce water usage. In parallel, the Company has also deployed a campaign to increase employee awareness of wise water use through media of pamphlets, video campaigns, and email. By adopting both technological and awareness campaign, the Company managed to reduce operational costs while actively participated in maintaining the sustainable availability of clean water and building a culture of wise water use.

Throughout 2023, the Company recorded water use for ship operations of 1,339,030 m³, an increase compared to 2022 water use of 1,246,192 kilolitres. This increase was due to increase number of trips on majority of the Company's routes.

AIR EMISSION MANAGEMENT

The Company realizes that ship operational activities are a significant contributor to emissions to the environment. Hence, the Company manages and controls the emissions produced through various steps of monitor, measure,

dihasilkan melalui berbagai langkah yaitu melalui pemantauan dan pengukuran emisi yang dihasilkan untuk memastikan bahwa emisi yang dihasilkan sesuai dengan baku mutu lingkungan yang berlaku. Perusahaan juga mulai melakukan penggunaan energi berkelanjutan baik pada operasional di pelabuhan dan kapal. Untuk operasional pelabuhan dan kapal, Perusahaan telah mengimplementasikan Anjungan Listrik Mandiri (ALMA) atau Stasiun Pengisian Listrik Kapal Sandar (SPLiKS) untuk menghubungkan penggunaan listrik dari darat pada saat kapal sedang sandar istirahat/off dengan durasi di atas 4 jam per hari sehingga dapat mengurangi pemakaian BBM untuk generator. Perusahaan juga telah menggunakan bahan bakar ramah lingkungan untuk kapal yaitu B30 yang merupakan bahan bakar biodiesel dengan campuran minyak nabati sebesar 30%. Kemudian di area kantor, Perusahaan telah menggunakan PLTS di Gedung Eksekutif Pelabuhan Merak dan Bakauheni.

Di samping itu, guna mendukung pengurangan emisi gas buang, Perusahaan juga telah menyediakan SPKLU di beberapa pelabuhan untuk mendukung program elektrifikasi kendaraan bermotor. Selain itu, Perusahaan juga mulai menggunakan kendaraan elektrik yang diperuntukkan bagi Direksi untuk mendukung program Pemerintah dan Kementerian BUMN dalam mendorong penggunaan kendaraan elektrik di lingkungan pemerintahan dan BUMN. Pada tahun 2023, Perusahaan juga menggelar aksi penanaman pohon sebanyak 4.050 bibit pohon di 27 cabang dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI dan Hari Konservasi Alam Nasional.

Untuk memastikan pengelolaan emisi yang terukur, Perusahaan melakukan pendataan emisi terutama dari operasional kapal sebagai kontributor emisi terbesar. Sepanjang tahun 2023, emisi yang dihasilkan dari operasional kapal untuk yaitu sebesar 191.188 ton CO₂ eq, lebih rendah dibandingkan emisi tahun 2022 sebesar 200.599 ton CO₂ eq. Penurunan emisi ini salah satunya didorong oleh program efisiensi BBM yang dilakukan sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam mengurangi dampak pencemaran udara.

and ensure that the emissions produced comply with applicable environmental quality standards. The Company has begun to shift to sustainable energy resources in both port and ship operations. For port and ship operations, the Company installed automated electric charging machine (ALMA) or ship docking electric charging station (SPLiKS) to promote electricity usage on land when the ship docks for longer than 4 hours per day in order to reduce fuel consumption used for generators. The Company has also switched to environmentally friendly fuel for ships, named B30, which is biodiesel fuel containing 30% vegetable oil. In the office areas, the Company has used solar power in the Merak and Bakauheni Ports Executive Buildings.

In addition, to support the reduction of exhaust emissions, the Company has installed Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU) at several ports to support the motor vehicle electrification program. Moreover, the Company also shifted vehicles intended for Directors to electric cars in efforts to support the Government and Ministry of SOEs programs in encouraging the use of electric vehicles in government and SOEs environments. In 2023, the Company organized tree planting action whereby 4,050 tree seedlings were planted in 27 branch offices to commemorate the 78th Anniversary of Indonesian Independence Day and National Nature Conservation Day.

To ensure measurable emissions management, the Company collects emissions data, especially from ship operations as the largest emissions contributor. Throughout 2023, emissions from ship operations amounted to 191,188 tons of CO₂ equivalent, lower than 2022 emissions of 200,599 tons of CO₂ equivalent. The reduced emissions was partly driven by the fuel efficiency program carried out in the Company's commitment to reduce air pollution impact.

PENGELOLAAN LIMBAH

Kegiatan operasional pelabuhan dan penyeberangan berkontribusi terhadap limbah yang dihasilkan sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk bertanggung jawab atas segala limbah yang diproduksi dengan membuat skema pengelolaan limbah yang sistematis untuk mendorong praktek pengelolaan limbah yang berkelanjutan, serta menciptakan kesadaran dan partisipasi aktif kru kapal dalam upaya pelestarian lingkungan melalui pengurangan limbah. Perusahaan melakukan identifikasi klasifikasi limbah untuk mengetahui potensi pencemaran yang mungkin terjadi, selanjutnya dilakukan pengelompokan jenis limbah berdasarkan kategori tertentu untuk kemudian dilakukan penanganan sebelum akhirnya dilakukan pembuangan setelah memenuhi persyaratan pembuangan limbah dan dilakukan sesuai batas wilayah yang telah ditetapkan pada peraturan dan standar internasional.

WASTE MANAGEMENT

Port and ferry operational activities contribute to waste production, which has the potential to pollute the environment. Therefore, the Company is committed to take responsibility for all waste produced by building a systematic waste management scheme to encourage sustainable waste management practices, and create awareness and active participation from ship crews in efforts to preserve the environment through waste reduction. The Company identify waste classifications to determine the potential pollution that may occur. Subsequently, the waste are grouped based on specific categories, then managed prior to disposal to meet the waste disposal criteria, and handled in accordance with the territory borders determined in regulations benchmarked to international standards.



Limbah yang dihasilkan oleh Perusahaan dapat berupa limbah B3 (Bahan Berbahaya & Beracun) maupun non-B3 misalnya limbah dari pelumas dan BBM yang digunakan dalam operasional kapal, limbah makanan dan minuman dari penyediaan kantin maupun yang dihasilkan oleh mitra bisnis maupun limbah lainnya yang terkait dengan aktivitas pelabuhan, penyeberangan, dan usaha aneka jasa.

Waste generated by the Company can be Toxic and Hazardous Materials (B3) or Non-Toxic and Non-Hazardous Materials (non-B3 waste). For example, waste from lubricants and fuel used in ship operations, food and beverage waste from canteen operations by business partners, or other waste related to port, ferry, and miscellaneous services.

Perusahaan telah memiliki TPS limbah B3 di Pelabuhan Bakauheni untuk mitigasi dampak pencemaran terhadap lingkungan. Selain itu, Perusahaan juga melakukan pengelolaan limbah secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengangkutan maupun pengolahan sebelum limbah dibuang ke TPS.

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan baru melakukan pendataan untuk limbah non-B3 yang tercatat sebesar 2.368,66 ton yang berasal dari 159 kapal yang beroperasi. Pada tahun 2024, Perusahaan tengah berupaya untuk melakukan pendataan limbah B3 agar Perusahaan dapat mengukur potensi risiko pencemaran lingkungan secara lebih akurat dan terukur.

BIAYA PROGRAM KERJA TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

Selama tahun 2023, Perusahaan telah berkontribusi tanggung jawab sosial pada lingkungan hidup dengan realisasi biaya sebesar Rp4,36 miliar, yang terdiri atas beberapa program dan kegiatan, seperti program penanaman pohon, penyediaan tong sampah, pembangunan infrastruktur sanitasi, kegiatan *Ocean Clean Up Day*, dan program lingkungan lainnya.

MEKANISME PENGADUAN ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

ASDP berkomitmen untuk menindak lanjuti segala laporan dan pengaduan yang diterima, serta melakukan tinjauan lapangan untuk memastikan laporan yang masuk. Perusahaan telah memiliki mekanisme pengaduan yang komunikatif dan terarah dalam menanggapi masalah lingkungan hidup yang terjadi di wilayah operasional Perusahaan. Segala bentuk keluhan dan pengaduan dapat disampaikan melalui saluran yang telah disediakan pada *contact center* (021) 191 atau 08111-021191, serta melalui *email* pelanggan@indonesiaferry.co.id. Seluruh pelaporan yang masuk akan diterima oleh Divisi Pelayanan dan segera ditindaklanjuti oleh Divisi Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan. Pengaduan secara langsung juga dapat dilakukan baik melalui petugas di lapangan, kantor cabang, maupun kantor pusat.

The Company has a temporary storage site for hazardous & toxic waste at Bakauheni Harbour to mitigate the impact of pollution on the environment. Apart from that, the Company also manages waste independently or collaborates with third parties for transportation and processing prior to waste disposed into temporary storage areas.

Throughout 2023, the Company collected data only on non-B3 waste, which was recorded at 2,368.66 tons from 159 operating vessels. In 2024, the Company would put endeavours to collect data on B3 waste so that the Company would be able to measure the potential risk of environmental pollution more accurately and quantifiable.

COSTS OF WORK PROGRAM IN SOCIAL RESPONSIBILITY IN ENVIRONMENTAL ASPECTS

During 2023, the Company has contributed to environmental responsibility with realized disbursed costs amounting to Rp4.36 billion. It consisted of several programs and activities, such as the tree planting program, trash cans furnishing, construction of sanitation infrastructures, and *Ocean Clean Up Day* activities, and other environmental programs

COMPLAINT MECHANISM FOR ENVIRONMENTAL ASPECTS

ASDP is committed to follow up on all reports and complaints received, as well as conducting field reviews to confirm the reports received. The Company has a communicative and targeted complaint mechanism in responding to environmental issues that occur in the Company's operational areas. All forms of complaints can be submitted via the mediums provided: contact center at (021) 191 or 08111-021191, and via email at pelanggan@indonesiaferry.co.id. Every reports will be received by the Service Division and will be immediately followed up by the Safety, Health & Environment Division. Direct complaints can also be made through officers in the field, branch offices or head office.

REFERENSI SEOJK NO.16/ SEOJK.04/2021

REFERENCE OF SEOJK NO.16/SEOJK.04/2021

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
Umum General			
1	Laporan Tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca.	The Annual Report is printed in good quality and uses legible font and size.	√
2	Laporan Tahunan harus dapat diperbanyak dalam bentuk salinan dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.	The Annual Report can be reproduced in printed and electronic copies.	√
3	Laporan Tahunan disajikan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan minimal 1 (satu) bahasa asing yaitu Bahasa Inggris, dengan muatan informasi yang sama.	The Annual Report is presented in proper Indonesian and at least 1 (one) foreign language, namely English, with the same information content.	√
4	Laporan Tahunan ditampilkan di situs web perusahaan.	The Annual Report is displayed on the company website.	√
Ikhtisar Data Keuangan Penting Summary of Key Financial Information			
<p>Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: Summary of key financial information contains financial information presented in 3 (three) fiscal year comparisons or since the commencement of the business if the Issuer or Public Company started its business for less than 3 (three) years, and at least contain:</p>			16 - 18
a.	Pendapatan/penjualan;	a. Revenue/Sales;	
b.	Laba bruto;	b. Gross profit;	
c.	Laba (rugi);	c. Profit (loss);	
d.	Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	d. Total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest;	
e.	Total laba (rugi) komprehensif;	e. Total comprehensive profit (loss);	
f.	Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	f. Total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and noncontrolling interest;	
g.	Laba (rugi) per saham;	g. Earning (loss) per share;	
h.	Jumlah aset;	h. Total assets;	
i.	Jumlah liabilitas;	i. Total liabilities;	
j.	Jumlah ekuitas;	j. Total equities;	
k.	Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	k. Profit (loss) to total assets ratio;	
l.	Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	l. Profit (loss) to equities ratio;	
m.	Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan;	m. Profit (loss) to income ratio;	
n.	Rasio lancar;	n. Current ratio;	
o.	Rasio liabilitas terhadap ekuitas;	o. Liabilities to equities ratio;	
p.	Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	p. Liabilities to total assets ratio; and	
q.	Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya.	q. Other information or financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and the type of industry.	

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
Informasi Saham Stock Information			
Informasi saham (jika ada) paling sedikit memuat: Stock information (if any) contains at least:			
1	Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah saham yang beredar; b. Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan saham dicatatkan; c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan d. Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. 	Shares issued for every quarter presented in a comparative format for the last 2 fiscal years, covering at least: <ul style="list-style-type: none"> a. Number of outstanding shares; b. Market capitalization based on the price at the stock exchange where the shares are listed on; c. Highest, lowest, and closing share prices at the stock exchange where the shares are listed on; and d. Trading volume at the stock exchange where the shares are listed on. 	122-123
2	Dalam hal terjadi Aksi Korporasi, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi; b. Rasio pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; c. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan d. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan e. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi. 	In the event of Corporate Actions, such as stock split, reverse stock, stock dividend, bonus share, and change in the nominal value of shares, issuance of convertible securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in point 1) shall be added with explanation on: <ul style="list-style-type: none"> a. Date of corporate action; b. Ratios of stock split, reverse stock, stock dividend, bonus share and changes in the nominal value of shares; c. Number of outstanding shares before and after corporate action; d. Amount of convertible bonds/stocks exercised (if any); and e. Share price before and after corporate action. 	122-123
3	Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham, dan/atau penghapusan pencatatan saham dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham dan/atau pembatalan pencatatan saham tersebut.	In the event of a temporary suspension of share trading (suspension) and/or delisting in the fiscal year, the Issuer or Public Company provides explanation on the reason for the suspension and/or delisting;	122-123
4	Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham dan/atau penghapusan pencatatan saham tersebut.	In the event that the temporary suspension of share trading as referred to in point 3) and/or the delisting is still effect until the date of the annual report period, Issuer or Public Company should explains the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/or delisting.	122-123

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
Laporan Direksi The Board Of Directors Report			
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors report should at least contain:			
1	Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik.	The performance of the Issuer or Public Company, at least covers: a. Strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company; b. Role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuer or Public Company; c. Process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategies; d. Comparison between results achieved and targets by the Issuer or Public Company; and e. Challenges faced by the Issuer or Public Company.	40-56
2	Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan	Description of business prospects of the Issuer or Public Company; and	40-56
3	Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	Implementation of governance of the Issuer or Public Company.	40-56
Laporan Dewan Komisaris The Board Of Commissioners Report			
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board Of Commissioners report should at least contain:			
1	Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi;	Evaluation of the performance of the Board of Directors on the management of Issuer or Public Company, including the supervision of the Board Of Commissioners in the formulation and of strategy implementation of Issuer or Public Company carried out by the Board of Directors;	26-38
2	Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan	Views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and	26-38
3	Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	Views on the implementation of governance of the Issuer or Public Company.	26-38
Profil Emiten atau Perusahaan Publik Profile of the Issuer or Public Company			
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: Profile of Issuer or Public Company contains at least the following information:			
1	Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku.	Name of the Issuer or Public Company, including change of name, reason of change, and the effective date of the name change in the fiscal year.	62-63 66-67
2	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: a. Alamat; b. Nomor telepon; c. Alamat surat elektronik; dan d. Alamat situs web.	Access to Issuer or Public Company, including branch offices or representative offices, where public can access information about Issuer or Public Company, including: a. Address; b. Telephone number; c. E-mail address; and d. Website address.	63
3	Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik.	Brief history of the Issuer or Public Company.	64-65
4	Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) atau nilai-nilai perusahaan.	Vision, mission and the corporate culture or values of the Issuer or Public Company.	72-74
5	Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan.	Line of business according to the latest articles of association, business activities carried out in the fiscal year, and types of goods and/or services produced.	75-76

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
6	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik, wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	Operational area of the Issuer or Public Company; operational area that is the area of the implemented operational activities or the extent of the company's operational activities.	77-79
7	Struktur Organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan.	Structure of organization of the Issuer or Public Company in chart format, at least covering one level below the Board of Directors, including committees under the Board of Directors (if any) and under the Board of Commissioners, with the names and titles.	80-81
8	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.	Memberships in industry association both on a national and international scale, related to the implementation of sustainable finance.	133
9	Profil Direksi, paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; b. Foto terbaru; c. Usia; d. Kewarganegaraan; e. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; f. Riwayat jabatan, meliputi informasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Komisaris; 2. Rangkap jabatan; dan 3. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. g. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi; h. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. 	Profiles of members of the Board of Directors, covering at least: <ul style="list-style-type: none"> a. Name and position according to duties and responsibilities; b. Recent photograph; c. Age; d. Citizenship; e. Education background and/or certification; f. Employment history, covering information on: <ol style="list-style-type: none"> 1. Legal basis for the appointment as a member of the Board of Directors; 2. Concurrent positions; and 3. Work experience and term of office in and outside of the Issuer or Public Company. g. Affiliation with other members of the Boards of Directors, Commissioners, the majority shareholders (if any), including the name of the affiliated party; h. Changes and reasons for the change in the composition of the Board of Directors. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed. 	95-105
10	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; b. Foto terbaru; c. Usia; d. Kewarganegaraan; e. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; f. Riwayat jabatan, meliputi informasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Komisaris; 2. Rangkap jabatan; dan 3. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. g. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; h. Pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; i. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. 	Profiles of members of the Board of Commissioners, covering at least: <ul style="list-style-type: none"> a. Name and position according to duties and responsibilities; b. Recent photograph; c. Age; d. Citizenship; e. Education background and/or certification; f. Employment history, covering information on: <ol style="list-style-type: none"> 1. Legal basis for the appointment as a member of the Board of Commissioners; 2. Concurrent positions; and 3. Work experience and term of office in and outside of the Issuer or Public Company. g. Affiliation with other members of the Boards of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including the name of the affiliated party; h. Statement of independence from the Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has served more than 2 (two) terms; i. Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. 	82-93

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
11	Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya.	In the event that there were changes to the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners that occurred after the end of the fiscal year up to the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the last and previous composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.	37 & 55
12	Jumlah Karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku.	Employees statistics by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year.	112-116
13	Nama Pemegang Saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan c. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik. 	Names of Shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the fiscal year, which consists of: <ul style="list-style-type: none"> a. Shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company; b. Members of the Board of Directors and Commissioners who own shares of the Issuer or Public Company; and c. Community shareholder group, namely the group of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company. 	122-123
14	Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	The percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer Or Public Company by members of the Boards of Directors and the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on registered shareholders for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.	123
15	Jumlah Pemegang Saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: <ul style="list-style-type: none"> a. Kepemilikan institusi lokal; b. Kepemilikan institusi asing; c. Kepemilikan individu lokal; dan d. Kepemilikan individu asing. 	Number of Shareholders and percentage of ownership at the end of the fiscal year based on classification: <ul style="list-style-type: none"> a. Ownership in local institutions; b. Ownership in foreign institutions; c. Local individual ownership; and d. Foreign individual ownership; 	123
16	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	Information regarding the majority and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, up to the individual owner, which is presented in the chart or schematic format.	123
17	Nama Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, Perusahaan Ventura Bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama tersebut. <p>Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.</p>	The name of the Subsidiary, Associate, Joint Venture company where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), and with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associate company, joint venture company. <p>For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.</p>	125-129

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
18	Kronologi Pencatatan Saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek di mana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada).	Chronology of Share Listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the fiscal year as well as the name of the Stock Exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, dividends shares, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and removal (if any).	130
19	Informasi pencatatan Efek lainnya selain Efek sebagaimana dimaksud pada angka 18, yang belum jatuh tempo paling sedikit memuat nama Efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbalance, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat Efek (jika ada).	Information on securities listing other than the securities as referred to in point 18), which have not matured, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any).	130
20	Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Nama dan alamat; b. Periode penugasan; c. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; d. Biaya jasa (<i>fee</i>) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan e. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut. 	Information on the use of a Public Accountant (AP) and a Public Accounting Firm (KAP) services and their networks/associations/alliances including: <ul style="list-style-type: none"> a. Name and address; b. Assignment period; c. Information on audit and/or non-audit services provided; d. Audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year; and e. In the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed to not provide non-audit services, then the information is disclosed. 	130
21	Nama dan alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal selain AP dan KAP.	Name and address of Capital Market Supporting Institutions and/or Professions other than AP and KAP.	131

Analisis dan Pembahasan Manajemen | Management Discussion and Analysis

1	Tinjauan Operasi per Segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; b. Pendapatan/penjualan; dan c. Profitabilitas. 	Operational review per segment of operations according to the type of industry of the Issuer or Public Company, containing at least: <ul style="list-style-type: none"> a. Production, including process, capacity, and growth; b. Sales/revenue; and c. Profitability. 	166-173
2	Kinerja Keuangan Komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total asset; b. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; c. Ekuitas; d. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan e. Arus kas. 	A comprehensive analysis on the financial statements that includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) financial years, and explanation on the causes and impact of such changes, at least covering: <ul style="list-style-type: none"> a. Current assets, non-current assets, and total assets; b. Short-term liabilities, long-term liabilities and total liabilities; c. Equities; d. Revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss), and e. Cash flows. 	174-194
3	Kemampuan Membayar Utang atau Kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan.	Ability to pay debts or obligations by providing the relevant ratios.	195-197
4	Tingkat Kolektibilitas Piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan.	Account receivables collectability of the Issuer or Public Company by presenting the relevant ratios.	197-200

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
5	Struktur modal dan kebijakan manajemen atas struktur modal tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud.	Capital structure and management policies on the capital structure, including the basis for the policy.	201-202
6	Bahasan mengenai Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi: a. Tujuan dari ikatan tersebut; b. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; c. Mata uang yang menjadi denominasi; dan d. Langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait	Discussion of material ties for capital goods investment with information on at least: a. The purpose of the bond; b. The expected source of funds to fulfill the commitment; c. Currency of denomination; and d. Measures taken by the Issuer or Public Company to protect the position of a related foreign currency against risk.	218
7	Bahasan mengenai Investasi Barang Modal yang Direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi: a. Jenis investasi barang modal; b. Tujuan investasi barang modal; dan c. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan.	Discussion of capital goods investments realized in the last fiscal year, at least contains: a. Type of capital goods investment; b. Purpose of capital goods investment; and c. Value of capital goods investments.	218
8	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan (jika ada).	Material information and fact occurring after the date of the accountant's report (if any).	231
9	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	Information on the prospect of the Issuer or Public Company in connection with the condition of the industry, economy in general and the international market, supported with quantitative data from reliable sources.	236-239
10	Perbandingan antara Target/Proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: a. Pendapatan/penjualan; b. Laba (rugi); c. Struktur modal; atau d. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	Comparison between the target/projection at the beginning of the fiscal year with the results achieved, regarding: a. Revenue/sales; b. Profit (loss); c. Capital structure; or d. Other matters deemed important to the Issuer or Public Company.	205-213
11	Target/Proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: a. Pendapatan/penjualan; b. Laba (rugi); c. Struktur modal; atau d. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	Targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding: a. Revenue/sales; b. Profit (loss); c. Capital structure; d. Other matters deemed important to the Issuer or Public Company.	205-213
12	Aspek Pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.	Marketing aspects of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share.	164-165
13	Uraian mengenai Dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit memuat: a. Kebijakan dividen; b. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; c. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan d. Jumlah dividen per tahun yang dibayar.	Description of Dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least: a. Dividend policy; b. Date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends; c. Amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and d. Amount of dividends distributed per year.	216-217

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
14	<p>Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan:</p> <p>a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan</p> <p>b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.</p>	<p>Realization of the use of proceeds from the public offering, provided that:</p> <p>a. During the fiscal year, the Issuer has an obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the fiscal year; and</p> <p>b. In the event that there were changes in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change.</p>	230
15	<p>Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: Tanggal, nilai, dan objek transaksi;</p> <p>a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi;</p> <p>b. Nama pihak yang melakukan transaksi;</p> <p>c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada);</p> <p>d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi;</p> <p>e. Pemenuhan ketentuan terkait; dan</p> <p>f. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); dan 2. Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); <p>g. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan;</p> <p>h. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;</p> <p>i. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p>	<p>Material information (if any), regarding investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and transactions with conflict of interest, which occurred during the fiscal year, at least covering:</p> <p>a. Date, value, and object of the transaction;</p> <p>b. Name of the transacting parties;</p> <p>c. Nature of the affiliation (if any);</p> <p>d. Explanation of the fairness of the transaction;</p> <p>e. Compliance with related provisions; and</p> <p>f. In the event that there is an affiliation relationship, in addition to information disclosure as referred to in point a) to e), the Issuer or Public Company also discloses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; and 2. The role of the Board of Commissioners and the Audit Committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; <p>g. For affiliated or material transactions which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated or material transactions are business activities carried out to generate operating income and carried out regularly, repeatedly, and/or continuously;</p> <p>h. For disclosure of affiliated transactions and/or transactions with conflict of interest resulting from the implementation of affiliated transactions and/or transactions with conflict of interest that have been approved by independent shareholders, information regarding the date of the GMS that approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;</p> <p>i. In the event that there is no affiliated transaction and/or transactions with conflict of interest, this matter shall be disclosed.</p>	229-230

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
16	Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	Changes in the laws and regulations that have a significant effect on Issuer or Public Company and their impact on financial statements (if any).	231
17	Perubahan Kebijakan Akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	Changes in accounting policies, reasons and impact on financial statements (if any).	234

Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik | Issuer or Public Company Governance

Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: Issuer or Public Company governance contains a brief description of:

1	RUPS, paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan 2. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. 	GMS, at least contains: <ul style="list-style-type: none"> a. Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year covering: <ol style="list-style-type: none"> 1. Resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior that were realized in the fiscal year; and 2. Resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior that have not been realized and the reasons; b. In the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed. 	250-256
2	Direksi, mencakup antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. b. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; c. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan 2. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); e. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur penilaian kinerja; dan 2. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan f. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. 	The Board of Directors, at least contains: <ul style="list-style-type: none"> a. Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and presented in tabular form. b. Statement that the Board of Directors has guidelines or charter; c. Policies and frequency of the Board of Directors meetings, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the attendance rate of members of the Board of Directors in the meeting including the GMS. The information can be presented in tabular form; d. Training and/or competency development of members of the Board of Directors: <ol style="list-style-type: none"> 1. Policies for training and/or competency development of members of the Board of Directors, including an onboarding program for newly appointed members (if any); and 2. Training and/or competency development attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any); e. The Board of Directors' performance appraisal of the committees that support the execution of the Board of Directors' duties for the fiscal year, at least contain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Performance appraisal procedures; and 2. Criteria used, such as performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings; and f. In the event that the Issuer or Public Company does not have any committee to support the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed. 	276-289

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
3	<p>Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris; Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada). Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan Pihak yang melakukan penilaian. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Prosedur penilaian kinerja; dan Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat. 	<p>The Board of Commissioners, at least contains:</p> <ol style="list-style-type: none"> Duties and responsibilities of the Board of Commissioners; Statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter; Policies and frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the attendance rate of members of the Board of Commissioners in these meetings including the GMS. The information can be presented in tabular form; Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners: <ol style="list-style-type: none"> Policy on competency training and/or development for members of the Board of Commissioners, including onboarding program for newly appointed members (if any); and Competency training and/or development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any). Performance appraisal of the Boards of Directors and Commissioners as well as each member of the Boards of Directors and Commissioners, at least containing: <ol style="list-style-type: none"> Procedures for implementing performance appraisals; Criteria used, such as performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings; and Party conducting the assessment. Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the execution of duties of the Board of Commissioners in the fiscal year, includes: <ol style="list-style-type: none"> Performance appraisal procedures; and Criteria use, such as performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings. 	257-275
4	<p>Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <ol style="list-style-type: none"> Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Komisaris antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. 	<p>The Nomination and Remuneration of the Boards of Directors and Commissioners.</p> <ol style="list-style-type: none"> Nomination procedure, including a brief description of the policies and process to nominate members of the Boards of Directors and/or Commissioners; Procedures and implementation of remuneration for the Boards of Directors and Commissioners, among others: <ol style="list-style-type: none"> Procedures to determine remuneration for the Boards of Directors and Commissioners; Remuneration structure of the Boards of Directors and Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and Amount of remuneration for each member of the Boards of Directors and Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form. 	292-299

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
5	Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.	The Sharia Supervisory Board, for Issuer or Public Company that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association.	Tidak relevan dengan kegiatan Perusahaan Irrelevant with the Company's activities.
6	Komite Audit, paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b. Usia; c. Kewarganegaraan; d. Riwayat pendidikan; e. Riwayat jabatan, meliputi informasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; 2. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan 3. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. f. Periode dan masa jabatan anggota komite audit; g. Pernyataan independensi komite audit; h. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); i. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan j. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit. 	The Audit Committee, at least contains: <ul style="list-style-type: none"> a. Name and position in committee membership; b. Age; c. Nationality; d. Educational history; e. Position history, including information on: <ol style="list-style-type: none"> 1. Legal basis for appointment as committee member; 2. Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, Directors, and/or committee as well as other positions (if any); and 3. Work experience and time period both in and outside the Issuer or Public Company. f. Period and term of office of the audit committee members; g. Statement of independence of the audit committee; h. Training and/or competency development attended in the fiscal year (if any); i. Policies and frequency of audit committee meetings and the attendance rate of audit committee members in those meetings; and j. The implementation of the audit committee's activities for the fiscal year in accordance with the audit committee guidelines or charter. 	303-312

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
7	<p>Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; Usia; Kewarganegaraan; Riwayat pendidikan; Riwayat jabatan, meliputi informasi: <ol style="list-style-type: none"> Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Periode dan masa jabatan anggota komite; Pernyataan independensi komite; Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); Uraian tugas dan tanggung jawab; Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> Alasan tidak dibentuknya komite; dan Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi. 	<p>The nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing:</p> <ol style="list-style-type: none"> Name and position in committee membership; Age; Nationality; Educational history; Position history, including information on: <ol style="list-style-type: none"> Legal basis for appointment as committee member; Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, Directors, and/or committee member and other positions (if any); and Work experience and time period both in and outside the Issuer or Public Company; Period and term of office of the committee members; Statement of committee independence; Training and/or competency development attended in the fiscal year (if any); Description of duties and responsibilities; Statement that the committee has a guideline or charter; Policies and frequency of meetings and attendance rate of members at the meeting; Brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and In the event that nomination and remuneration committee is not formed, the Issuer or Public Company to disclose the information as referred to in point i) to l) and disclose: <ol style="list-style-type: none"> Reasons for not forming the committee; and Party carrying out the nomination and remuneration function. 	312-320
8	<p>Komite Lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, yang mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; Usia; Kewarganegaraan; Riwayat pendidikan; Riwayat jabatan, meliputi informasi: <ol style="list-style-type: none"> Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Periode dan masa jabatan anggota komite; Pernyataan independensi komite; Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); Uraian tugas dan tanggung jawab; Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku. 	<p>Other committees owned by Issuer or Public Company to support the functions and duties of the Boards of Directors (if any) and/or Commissioners, at least containing:</p> <ol style="list-style-type: none"> Name and position in committee membership; Age; Nationality; Educational history; Position history, including information on: <ol style="list-style-type: none"> Legal basis for appointment as committee member; Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, Directors, and/or committee and other positions (if any); and Work experience and time period both in and outside the Issuer or Public Company; Period and term of office of the committee members; Statement of committee independence; Training and/or competency development attended in the fiscal year (if any); and Description of duties and responsibilities; Statement that the committee has guidelines or charters; Policies and frequency of committee meetings and the attendance rate of committee members at the meeting; and Brief description of the committee's activities for the fiscal year. 	320-330

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
9	Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat:	Corporate secretary, at least contains:	334-339
	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama; b. Domisili; c. Riwayat jabatan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan 2. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. d. Riwayat pendidikan; e. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan f. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Name; b. Domicile; c. Position history, including: <ul style="list-style-type: none"> 1. Legal basis for appointment as company secretary; and 2. Work experience and time period both in and outside the Issuer or Public Company. d. Educational history; e. Training and/or competency development attended during the fiscal year; and f. Brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the fiscal year. 	
10	Unit audit internal, paling sedikit memuat:	Internal audit unit, at least contains:	339-358
	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama kepala unit audit internal; b. Riwayat jabatan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan 2. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; c. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; e. Struktur dan kedudukan unit audit internal; f. Uraian tugas dan tanggung jawab; g. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan h. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Name of the head of the internal audit unit; b. Position history, including: <ul style="list-style-type: none"> 1. Legal basis for the appointment as head of the internal audit unit; and 2. Work experience and time period both in and outside the Issuer or Public Company; c. Qualification or certification as an internal audit (if any); d. Training and/or competency development attended during the fiscal year; e. Structure and position of the internal audit unit; f. Description of duties and responsibilities; g. Statement that the internal audit unit has had guidelines or charters; and h. Brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the fiscal year including the policy and frequency of meetings with the Boards of Directors, Commissioners, and/or audit committee. 	
11	Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	Description of the internal control system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing:	361-367
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; b. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan c. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations; b. Review of the effectiveness of the internal control system; and c. Statement of the Boards of Directors and/or Commissioners on the adequacy of the internal control system. 	
12	Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	The risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least contains:	368-391
	<ul style="list-style-type: none"> a. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; b. Jenis risiko dan cara pengelolaannya; c. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan d. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko. 	<ul style="list-style-type: none"> a. General description of the risk management system of the Issuer or Public Company; b. Types of risks and mitigation measures; c. Review of the effectiveness of risk management system of the Issuer or Public Company; and d. Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system. 	

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
13	Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: a. Pokok perkara/gugatan; b. Status penyelesaian perkara/gugatan; dan c. Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik.	Legal cases with material impact faced by the Issuer or Public Company, its subsidiaries, members of the Boards of Directors and Commissioners (if any), at least contain: a. Substance of the case/claim; b. Status of settlement of cases/claims; and c. Impact on the Issuer or Public Company.	392
14	Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada).	Information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuer or Public Company, members of the Boards of Commissioners and Directors, by the Financial Services Authority and other authorities for the fiscal year (if any).	395
15	Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: a. Pokok-pokok kode etik; b. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan c. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik.	Information regarding the code of ethics of the Issuer or Public Company includes: a. Key points of the code of ethics; b. Form of socialization of the code of ethics and its enforcement efforts; and c. Statement that the code of ethics applies to members of the Boards of Directors, Commissioners, and employees of Issuer or Public Company.	400-406
16	Uraian mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan.	Brief description of the policy of long-term performance-based compensation to management and/or employees.	432
17	Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; b. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud.	Brief description of the information disclosure policy regarding: a. Share ownership of members of the Boards of Directors and Commissioners; b. Implementation of the policy.	265 & 285
18	Uraian mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi: a. Cara penyampaian laporan pelanggaran; b. Perlindungan bagi pelapor; c. Penanganan pengaduan; d. Pihak yang mengelola pengaduan; dan e. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: 1. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan 2. Tindak lanjut pengaduan.	Description of the Whistleblowing System at the Issuer or Public Company, at least containing: a. Method of submitting a violation report; b. Protection for whistleblowers; c. Complaint handling; d. Party managing the complaint; and e. Result of complaint handling, at least: 1. Number of complaints received and processed in the fiscal year; and 2. Follow-up on complaints.	411-419
19	Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik.	Description of anti-corruption policy of the Issuer or Public Company.	407-410
20	Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: a. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau b. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).	Implementation of Governance Guidelines for the Public Company for Issuer issuing Equity Securities or Public Company, including: a. Statement regarding the recommendations that have been implemented; and/or b. Explanation of recommendations that have not been implemented, with reasons and alternative implementations (if any).	246

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Corporate Social and Environmental Responsibility			
1	Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	Information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report, as intended in Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies, containing at least:	435-479
	<ul style="list-style-type: none"> a. Penjelasan strategi keberlanjutan; b. Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); c. Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; d. Penjelasan Direksi; e. Tata kelola keberlanjutan; f. Kinerja keberlanjutan; g. Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; h. Lembar umpan balik (<i>feedback</i>) untuk pembaca; dan i. Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Explanation of the sustainability strategy; b. Overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental); c. Brief profile of the Issuer or Public Company; d. Explanation of the Board of Directors; e. Sustainability governance; f. Sustainability performance; g. Written verification from an independent party, if any; h. Feedback sheet for readers; and i. Response of the Issuer or Public Company to the previous year's report feedback. 	
2	Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	The Sustainability Report as referred to in point 1), must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for Formulating Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as stated in Appendix II which is an inseparable part of this Financial Services Authority Circular Letter.	435-479
3	Informasi Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) pada angka 1) dapat:	Sustainability Report information in point 1) can:	435-479
	<ul style="list-style-type: none"> a. Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau b. Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Disclose in other relevant sections aside from social and environmental responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the relevant section of the Directors' Report; and/or b. Refer to other sections aside from the social and environmental responsibility section while still referring to the Technical Guidelines for Formulating Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II, which is an inseparable part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of Issuer or Public Company. 	
4	Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan.	The Sustainability Report as referred to in point 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report.	435-479

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
5	Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:	In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must:	435-479
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan b. Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Contain all information as intended in number 1); and b. Prepared in accordance with the Technical Guidelines for Formulating Sustainability Reports for Issuers and Public Companies. 	
6	Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan.	In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the social and environmental responsibility section contains information that reports regarding social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report, which is presented separately from the Annual Report.	435-479
7	Penyampaian Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.	Sustainability Report presented separately from the Annual Report is to be submitted together with the submission of the Annual Report.	435-479

Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit | Audited Annual Financial Report

1	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek.	The annual financial reports included in the Annual Report are prepared in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia and audited by a Public Accountant. The financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulates the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.	496-569
---	---	---	---------

Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan | Statement Letters of Members of the Boards of Directors and Commissioners Regarding Responsibilities for the Annual Report

1	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	Statements of members of the Boards of Directors and Commissioners regarding the responsibilities of the Annual Report being prepared in accordance with the format of Statement Letters Of Members Of The Board Of Directors And Members Of The Board Of Commissioners regarding Responsibilities For The Annual Report as contained in the Appendix I, which is an integral part of Circular Letter of Financial Services Authority.	58-59
---	---	--	-------



